

**PERSAINGAN GEOEKONOMI ANTARA TIONGKOK DAN AMERIKA
SERIKAT PADA MASA KEPEMIMPINAN JOE BIDEN 2022-2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NABILA DIVA AZZAHRO

21323283

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

**PERSAINGAN GEOEKONOMI ANTARA TIONGKOK DAN AMERIKA
SERIKAT PADA MASA KEPEMIMPINAN JOE BIDEN 2022-2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NABILA DIVA AZZAHRO

21323283

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERSAINGAN GEOEKONOMI ANTARA TIONGKOK DAN
AMERIKA SERIKAT PADA MASA KEPEMIMPINAN JOE BIDEN
2022-2024**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat
Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

2 Tri Inov Haripa, S.Hub.Int., M.A.

3 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.

4 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 11 April 2025

Nabila Diva Azzahro

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB 2 PERSAINGAN GEOEKONOMI ANTARA TIONGKOK – AMERIKA SERIKAT PADA KEPEMIMPINAN JOE BIDE TAHUN 2022-2024	19
2.1 BRI: Strategi Tiongkok dalam Membangun Konektivitas Global	20
2.1.1 Latar Belakang Dibentuknya BRI	20
2.1.2 Komponen Utama BRI	23
2.1.3 Pendanaan BRI	26
2.1.4 Dampak Ekonomi dan Politik Dari Inisiatif BRI Tiongkok	28
2.2 PGII: Respon Amerika Serikat bersama G7 terhadap Tantangan Global ...	29
2.2.1 Latar Belakang Dibentuknya PGII	29
2.2.2 Komponen Utama PGII.....	31
2.2.3 Pendanaan PGII.....	33
2.2.4 Dampak Ekonomi dan Politik Dari Inisiatif PGII AS Bersama G7....	34
2.3 Perbandingan Inisiatif BRI Tiongkok dan PGII Amerika Serikat dan G7..	36
BAB 3 ANALISIS TEORI GEOEKONOMI DALAM PERSAINGAN GEOEKONOMI TIONGKOK DAN AMERIKA SERIKAT MELALUI INISIATIF BRI DAN PGII	40
3.1 <i>Investment Policy</i>	43
3.2 <i>Economic Assistance</i>	48
3.3 <i>National Policies Governing Energy and Commodities</i>	52
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60

4.2	Rekomendasi	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Indikator Geoekonomi Dalam Inisiatif BRI dan PGII	58
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta BRI Tiongkok.....	22
Gambar 2.2 Peta Jalur Sutra.....	25

DAFTAR SINGKATAN

AIIB	: Asian Infrastructure Investment Bank
BDN	: Blue Dot Network
BRI	: Belt and Road Initiative
B3W	: Build Back Better World
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CDB	: China Development Bank
CCCC	: China Communications Construction Company
CNPC	: China National Petroleum Corporation
DFC	: U.S. International Development Finance Corporation
ESG	: Environmental, Social, and Governance
FDI	: Foreign Direct Investment
MDBs	: Multilateral Development Banks
MSR	: Maritime Silk Road
OBOR	: One Belt One Road
PGII	: Partnership for Global Infrastructure and Investment
SDGs	: Sustainable Development Goals
SREB	: Silk Road Economic Belt
USAID	: United States Agency for International Development
USTDA	: United States Trade and Development Agency

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pergeseran pola dalam mencapai dominasi global, terdapat pergeseran pola dari militer menjadi ke penggunaan alat-alat ekonomi. Antara Tiongkok dan AS menggunakan investasi sebagai ajang mereka memperluas pengaruhnya di ranah global khususnya pada masa kepemimpinan Joe Biden 2022-2024. Tiongkok mengusung Belt and Road Initiative (BRI) sejak 2013 untuk memperluas pengaruhnya di negara berkembang, sementara AS merespons dengan meluncurkan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) pada 2022 di bawah kepemimpinan Joe Biden dan negara G7.. Persaingan antara kedua negara ini selaras dianalisis menggunakan konsep geoekonomi dari Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari persaingan tersebut menghasilkan dampak yang berbeda dari kedua inisiatif tersebut dilihat dari bagaimana masing-masing inisiatif mempengaruhi negara-negara penerima investasi. BRI Tiongkok cenderung meningkatkan ketergantungan pada modal dan teknologi sedangkan PGII menawarkan alternatif yang sesuai dengan kepentingan Barat.

Kata-kata kunci: BRI, Geoekonomi, Investasi Infrastruktur, PGII, Persaingan Tiongkok-AS

ABSTRACT

This research is motivated by the shift in patterns of achieving global dominance, from military power to the use of economic tools. Between China and the US, investment is being used as a means of expanding their influence in the global arena, particularly during Joe Biden's leadership from 2022 to 2024. China has been promoting the Belt and Road Initiative (BRI) since 2013 to expand its influence in developing countries, while the US responded by launching the Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) in 2022 under the leadership of Joe Biden and the G7 countries. The competition between the two countries is analyzed using the geoeconomic concept of Robert D. Blackwill and Jennifer M. Harris. The research findings indicate that the competition has produced different impacts from the two initiatives, as seen in how each initiative affects the recipient countries of investment. China's BRI tends to increase dependence on capital and technology, while PGII offers an alternative that aligns with Western interests.

Keywords: BRI, Geoeconomics, Infrastructure Investment, PGII, China-US Competition

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi yang semakin terintegrasi, hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah menjadi salah satu yang paling penting dan kompleks di dunia. Perang dagang yang dimulai tahun 2018 antara dua kekuatan ekonomi terbesar ini telah menghasilkan dampak signifikan bagi ekonomi global dan berpotensi mengubah dinamika hubungan internasional secara keseluruhan. Kini untuk mencapai dominasi global terdapat pergeseran pola dari militer menjadi ke penggunaan alat-alat ekonomi, antara dua negara yang sedang berseteru ini menggunakan alat ekonomi sebagai ajang mereka memperluas pengaruhnya di ranah global.

Perkembangan kerja sama antar negara dalam mempertahankan eksistensinya semakin meningkat sejalan dengan hubungan internasional. Negara-negara tersebut mulai beralih menggunakan *soft power* atau *low politics* dalam kerja sama internasional. Hal tersebut dikarenakan pergeseran penggunaan alat militer atau *hard power*. Di era globalisasi, hubungan antar negara tentu dipengaruhi oleh kerja sama internasional, sebab kerja sama antar negara memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan nasional dari masing-masing negara dan memenuhi berbagai kepentingan dari potensi yang dapat diperoleh atas mekanisme kerja sama.

Pada abad ke-21 persaingan antara Tiongkok dan AS menjadi salah satu tema utama dalam dinamika hubungan internasional. Kedua negara tidak hanya bersaing dalam sektor perdagangan dan teknologi, namun juga dalam pengaruh investasi global, sebab hal tersebut dinilai menjadi instrumen penting dalam

memperkuat kedudukan geoekonomi mereka di dunia. Untuk membangun aliansi ekonomi yang strategis, menciptakan ketergantungan, dan memperluas pengaruh politik di berbagai kawasan strategis, maka investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) atau biasa disebut FDI sering digunakan karena dianggap menjadi alat yang cukup strategis (Loungani and Razin, 2001).

Persaingan antara Tiongkok dan AS di bidang ekonomi dan investasi global semakin intensif dalam beberapa dekade terakhir. Masing-masing negara memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk memperluas dominasinya, khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki peluang strategis serta ekonomi. Salah satu arena utama dari persaingan tersebut adalah inisiatif investasi global yang diterbitkan masing-masing negara yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) oleh Tiongkok dan *Build Back Better World* (B3W) yang diinisiasi oleh AS, kemudian direbranding menjadi *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) bersama negara G7.

Pasalnya, Tiongkok menggunakan keuangan, investasi, serta perdagangan sebagai alat untuk membangun aliansi serta merubah dominasi AS. Dengan menggunakan analisis geoekonomi, Tiongkok dapat memperluas hubungan antara keamanan, kekuasaan, serta wilayah dengan menekankan kemampuan untuk memanfaatkan dan memanipulasi “*the economic binds that tie states together*” (“Critical infrastructure in geostrategic competition: comparing the US and Chinese Silk Road projects” 2019, 43). Salah satu kerja sama internasional yang banyak mendapat pengakuan dari dunia internasional adalah kerja sama skema *One Belt One Road* (OBOR) atau juga dikenal sebagai BRI yang dibentuk oleh Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping (Iswardhana 2022, 3).

Pelaksanaan BRI lebih didominasi dengan proyek pembangunan

infrastruktur lintas batas yang menyambungkan Tiongkok dengan negara-negara lain untuk membangun jalur perdagangan yang tentunya berpusat di Tiongkok (Iswardhana, 2022), secara luas BRI menekankan kerja sama pada lima bidang: (a) mengkoordinasikan kebijakan pembangunan; (b) membentuk jaringan infrastruktur dan fasilitas; (c) memperkuat hubungan investasi dan perdagangan; (d) meningkatkan kerja sama keuangan; dan (e) memperdalam pertukaran sosial dan budaya (Johnston 2018, 42).

Proyek ini didanai sebagian besar dari bank pemerintah Tiongkok serta dana khusus seperti *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Dengan mengundang modal atau dana dari dalam negeri Tiongkok, AIIB akan menyediakan dana untuk digunakan oleh negara-negara mitra dalam membangun infrastruktur mereka masing-masing. Hal positif dari AIIB jika dibandingkan dengan lembaga keuangan internasional lain adalah, AIIB bersedia untuk membiayai infrastruktur bagi negara berpenghasilan rendah, mendatangkan keterlibatan dari sektor swasta dalam proyek, dan Tiongkok percaya jika AIIB mampu meminimalkan utang publik negara (Prinsloo, 2019).

Tiongkok akan memberikan pinjaman dan investasi yang digunakan untuk mendanai pembangunan proyek kepada pemerintah atau entitas mitra dengan bunga tertentu atau biasanya Tiongkok menjadi pemilik sebagian proyek. Tiongkok akan bekerja sama dengan negara mitra untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pelabuhan, bandara, jalan raya, atau jaringan energi. Jika suatu proyek telah berhasil, maka pengembalian Investasi (*Return of Investment*) yang didapat Tiongkok adalah, negara mitra membayar kembali pinjaman melalui pendapatan proyek atau mendapatkan hak pengelolaan sementara atas aset.

Kawasan Asia merupakan salah satu kawasan yang sangat menguntungkan untuk negara-negara besar yang ingin berinvestasi serta mengembangkan politik luar negerinya (Kurniasih 2020, 363). Oleh sebab itu Tiongkok dengan kepentingan nasionalnya berusaha mendominasi sebagian besar negara-negara Asia. Tiongkok berusaha menjadi negara adidaya baru dengan menguasai ranah global melalui proyek BRI. Namun Joe Biden bersama negara G7 tidak ingin tertinggal dalam persaingan investasi dengan Tiongkok, serta berusaha menyaingi proyek BRI dari Tiongkok dengan terobosan baru yang dibuatnya yaitu PGII.

Pada masa kepemimpinan Joe Biden 2021-2024, skema investasi AS ternyata mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan pada masa kepemimpinan sebelumnya. Biden berupaya untuk membangun kembali posisi global AS yang sebelumnya terhalang oleh pendekatan unilateral pada masa kepemimpinan Donald Trump. Pada tahun 2022, di KTT G7, Joe Biden mengumumkan PGII sebagai penyeimbang terhadap inisiatif BRI. Joe Biden dengan negara G7 menyerukan untuk mengumpulkan \$600 miliar selama lima tahun untuk mendanai peluncuran proyek infrastruktur di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah (Ming, 2022).

PGII menargetkan proyek infrastruktur “lunak” yang akan diarahkan untuk menangani perubahan iklim, meningkatkan kesehatan global, mencapai kesetaraan gender, serta membangun infrastruktur digital. AS menekankan pentingnya kerangka investasi infrastruktur alternatif, seperti PGII untuk menyediakan pilihan pembiayaan yang transparan dan berkelanjutan. Hal tersebut memberikan strategi yang lebih luas untuk melawan pengaruh Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur global (Sehrawat, 2024).

AS juga berjanji akan mengumpulkan \$200 miliar dari total dana tersebut

melalui hibah, dana federal dan investasi swasta, sedangkan Uni Eropa mengumumkan tambahan dana 300 miliar euro. Walaupun tujuan PGII yang disampaikan adalah “memberikan manfaat bagi semua orang”, namun melalui infrastruktur di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, secara luas dianggap sebagai penyeimbang dari inisiatif BRI Tiongkok (Zhu, 2022).

Dalam persaingan ini, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua inisiatif tersebut. BRI kerap kali menawarkan pinjaman dan investasi besar dengan syarat lunak, namun kritik diarahkan pada resiko *debt trap diplomacy* yang akan membebani negara penerima dengan utang yang besar. Sebaliknya, PGII mencoba menjadi alternatif yang lebih transparan dan fokus pada standar tinggi dalam pembangunan infrastruktur, termasuk komitmen pada keberlanjutan lingkungan.

Masa kepemimpinan Joe Biden menjadi momen penting dalam persaingan investasi ini. Biden memperkuat upaya untuk mendorong PGII sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang terhadap Tiongkok, serta memperkuat aliansi dengan negara-negara maju lainnya. Persaingan antara BRI dan PGII mencerminkan dinamika geoekonomi yang lebih luas dalam hubungan Tiongkok-AS. Masing-masing negara saling membangun narasi tentang model pembangunan yang ideal untuk negara-negara berkembang. Pada penelitian ini akan menganalisis bagaimana persaingan investasi berlangsung selama periode 2022-2024, dengan fokus pada dinamika persaingan investasi antara Tiongkok dan AS menggunakan inisiatif BRI dan PGII.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk persaingan geoekonomi antara BRI Tiongkok dan PGII Amerika Serikat dalam memperluas pengaruh global?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan instrumen geoekonomi oleh Tiongkok melalui BRI dan oleh Amerika Serikat melalui PGII pada masa kepemimpinan Joe Biden 2022–2024.
2. Untuk membandingkan pendekatan geoekonomi yang digunakan Tiongkok melalui BRI dan AS melalui PGII dalam mempengaruhi dinamika ekonomi global.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian berfokus pada analisis persaingan investasi antara Tiongkok dan AS pada masa kepemimpinan Joe Biden (2022-2024), dengan fokus membandingkan inisiatif BRI dan PGII. Analisis utama adalah strategi geoekonomi dari kedua inisiatif tersebut dalam konteks pembangunan infrastruktur global. Pada penelitian ini akan dibatasi pada periode kepemimpinan Joe Biden 2022-2024, mencakup wilayah di negara-negara berkembang yang menjadi target utama dalam investasi BRI dan PGII. Dengan demikian, penulis akan memberikan perspektif khusus terhadap interaksi geoekonomi kedua negara di tengah dinamika politik dan ekonomi global.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang akan mendukung penulis dalam memperkaya khasanah penelitian, dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang mengambil topik yang sama. Oleh karena itu penulis akan melakukan tinjauan terhadap sejumlah kajian yang sudah dilakukan mengenai topik ini dari beberapa jurnal, buku, dan artikel.

Sumber yang pertama penulis gunakan sebagai acuan adalah buku yang berjudul “*Understanding China’s Belt and Road Initiative*” (Hong Yu, 2024). Buku ini memberikan pemikiran kritis tentang proyek China yang paling ambisius dari berdirinya Republik Rakyat China, yaitu inisiatif BRI. Salah satu fokus utama dalam buku ini adalah pengaruh BRI pada hubungan ekonomi dan politik global dan implementasi proyeknya di berbagai negara, khususnya di Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Hong Yu menekankan bagaimana keberhasilan dan kegagalan proyek tertentu dalam BRI mempengaruhi reputasi China di mata dunia, dan bagaimana kebijakan China dalam menanggapi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, meneliti interaksi antara BRI dan isu-isu global seperti keamanan energi, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Pada bagian akhir buku ini Hong Yu mengeksplorasi prospek kolaborasi baru antara negara-negara yang terlibat dalam BRI dengan China, khususnya dalam konteks pasca COVID-19. Buku ini membahas peluang-peluang yang ada untuk memperkuat hubungan bilateral ataupun multilateral yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang lebih adil dan berkelanjutan (Yu, 2024). Keterbatasan kajian pada buku karya Hong Yu adalah pada studi tersebut menjelaskan buku “*Understanding China’s Belt and Road Initiative*” karyanya memang menyebutkan PGII sebagai salah satu inisiatif global yang bersaing dengan

BRI dalam mempercepat konektivitas antarwilayah melalui investasi dan pengembangan infrastruktur. Namun, buku ini menyoroti bahwa banyak inisiatif seperti PGII masih berada pada tahap visi dan belum mencapai skala, cakupan geografis, atau pengaruh geoekonomi yang setara dengan BRI. Sehingga dapat dilihat pada bukunya menjelaskan kecenderungan melihat BRI sebagai strategi ekspansi ekonomi Tiongkok serta PGII sebagai respon AS tanpa menggali efektifitas dan implementasi aktual PGII dalam menyaingi BRI di negara-negara mitranya.

Sedangkan fokus utama penulis adalah lebih menekankan pada dinamika persaingan investasi antara inisiatif BRI dan PGII dalam konteks investasi global dan infrastruktur, penulis akan membandingkan strategi investasi Tiongkok dan AS, sejauh mana strategi PGII mampu menyaingi dominasi BRI, mengingat PGII masih dalam tahap awal implementasi. Penulis akan memaparkan efektifitas dan implementasi aktual PGII yang sudah berjalan di beberapa wilayah. Kemudian hasil dari perbandingan tersebut akan di eksplorasi bagaimana kedua inisiatif tersebut mempengaruhi hubungan AS maupun Tiongkok pada negara- negara penerima investasi. Dengan pendekatan ini, penelitian penulis akan memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika persaingan investasi global antara Tiongkok dan AS di bawah kepemimpinan Joe Biden.

Acuan selanjutnya penulis menggunakan artikel yang berjudul “*The Geopolitics of Global Infrastructure Projects: Challenges and Opportunities for Health and Wellbeing*” (Abdul Moiz Khan, 2024). Pada artikel ini memberikan wawasan komprehensif mengenai bagaimana proyek infrastruktur global berfungsi sebagai alat geopolitik serta dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan. Infrastruktur bukan lagi hanya pada struktur fisik seperti jalan dan jembatan, namun

juga mencakup layanan penting seperti kesehatan juga pendidikan. Dengan menganalisis inisiatif seperti BRI dan PGII, Khan menyoroti peluang serta tantangan yang muncul, termasuk isu keberlanjutan, tata kelola, dan ketegangan geopolitik. Pendekatan tersebut menawarkan pemahaman mendalam mengenai peran infrastruktur dalam pembangunan sosial-ekonomi serta implikasinya bagi kesejahteraan global. Artikel ini mengeksplorasi dimensi multifaset dari proyek infrastruktur global, mengkaji implikasinya terhadap kesehatan dan kesejahteraan di tengah persaingan geopolitik yang terus berkembang. Dengan menganalisis inisiatif utama seperti BRI dan PGII, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana investasi infrastruktur dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang adil sambil menavigasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, masalah tata kelola, dan persaingan geopolitik. Memahami dinamika ini sangat penting untuk memanfaatkan potensi transformatif proyek infrastruktur global untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan dalam skala global. Inti dari dinamika Persaingan antara BRI Tiongkok dan PGII AS dalam pembangunan infrastruktur global tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kesehatan dan kesejahteraan. BRI menekankan konektivitas ekonomi, sementara PGII berfokus pada keberlanjutan dan tata kelola yang selaras dengan nilai-nilai Barat dan standar tata kelola global. Karena kekuatan global ini berfokus pada pembangunan infrastruktur, implikasinya terhadap kesehatan dan kesejahteraan muncul sebagai pertimbangan kritis.

Meskipun artikel jurnal tersebut sama-sama membahas BRI dan PGII, namun tidak terdapat analisis perbandingan langsung mengenai strategi investasi dan dampak kedua inisiatif tersebut dalam konteks persaingan investasi antara Tiongkok dan AS. Fokusnya terbatas pada dampak kesehatan dan kesejahteraan,

pada artikel yang ditulis Abdul Moiz Khan menitikberatkan pada dampak proyek infrastruktur terhadap kesehatan dan kesejahteraan, sedangkan penelitian penulis mengeksplorasi dampak ekonomi, dan politik pada negara miskin dan berkembang dari persaingan investasi antara Tiongkok dan AS melalui BRI dan PGII yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan hasil dari kedua inisiatif tersebut nantinya.

Acuan terakhir yang digunakan penulis adalah artikel yang berjudul “*Geo-Economic Linkages between China and the Countries along the 21st-Century Maritime Silk Road and Their Types*” (Wei Hu et al., 2022). Pada artikel ini menganalisis kemajuan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), interaksi geo-ekonomi antara China dan negara-negara di sepanjang Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (MSRC) terus meningkat, dan menganalisis hubungan geo-ekonomi antara China dan MSRC sangat penting untuk pemahaman ilmiah tentang kerja sama geo-ekonomi bilateral. Berbeda dengan logika tradisional kompetisi dan kerja sama geo-ekonomi, kami membangun kerangka kerja baru berdasarkan faktor-faktor dominan dalam hubungan geo-ekonomi dan menggunakan model regresi hutan acak ekstrem untuk mengklasifikasikan jenis hubungan geo-ekonomi antara China dan MSRCs dari tahun 2006 hingga 2017. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan yang tidak seimbang dalam investasi dan perdagangan antara China dan MSRCs menghambat peningkatan intensitas hubungan geo-ekonomi bilateral dari 2006 hingga 2017. Efek Matthew dari aliran geo-ekonomi China dengan MSRCs sangat signifikan. Terdapat perbedaan yang jelas dalam faktor-faktor dominan yang mempengaruhi jenis hubungan geo-ekonomi antara China dan MSRCs, dan distribusi pentingnya indeks jenis hubungan geo-ekonomi di setiap negara tidak teratur. Geopolitik, pasar, dan sumber daya telah memainkan peran penting dalam hubungan geo-ekonomi antara China dan MSRCs. Ada lima jenis hubungan geo-ekonomi antara

China dan MSRCs: tipe berorientasi pasar, tipe berorientasi sumber daya, tipe berorientasi pasar dan sumber daya, tipe berorientasi pasar dan geopolitik, serta tipe berorientasi sumber daya dan geopolitik, di mana tipe berorientasi pasar merupakan jenis hubungan geo-ekonomi yang paling penting. Di masa depan, China seharusnya fokus pada kekuatan regional di sepanjang Jalur Sutra Maritim untuk kerja sama geo-ekonomi bilateral, secara aktif mempromosikan perkembangan seimbang aliran elemen geo-ekonomi bilateral, memperkuat kerja sama geopolitik dengan MSRCs, dan merumuskan rencana kerja sama sesuai dengan jenis hubungan geo-ekonomi.

“Geo-Economic Linkages between China and the Countries along the 21st Century Maritime Silk Road and Their Types” menekankan pada keterkaitan geoekonomi antara Tiongkok dan negara-negara jalur *Maritime Silk Road* dengan menggunakan analisis data kuantitatif periode 2006–2017. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pola perdagangan, investasi, keuangan, dan teknologi, serta mengklasifikasikan jenis keterhubungan geoekonomi yang terbentuk. Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai evolusi hubungan geoekonomi Tiongkok dengan negara-negara mitra BRI, penelitian ini tidak membahas secara eksplisit perbandingan strategi geoekonomi Tiongkok dengan kekuatan besar lain seperti Amerika Serikat, maupun inisiatif alternatif seperti PGII.

Sementara itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis persaingan geoekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat melalui BRI dan PGII pada masa kepemimpinan Joe Biden (2022–2024). Dengan menggunakan instrumen geoekonomi seperti *investment policy*, *economic assistance*, serta *national policies governing energy and commodities*, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komparatif, kontemporer, dan relevan dengan

dinamika persaingan global terkini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut rumusan masalah serta latar belakang yang terdapat pada penelitian ini, penulis menguraikan hasilnya dengan menggunakan Konsep Geoekonomi yang dikemukakan oleh Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris dalam buku “*War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*” dalam menganalisis perekonomian serta persaingan investasi antara Tiongkok dan AS pada masa kepemimpinan Joe Biden 2022-2024.

Dalam menganalisis persaingan investasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Joe Biden (2022-2024), kerangka pemikiran yang digunakan mengacu pada konsep geoekonomi yang dikemukakan oleh Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris. Konsep geoekonomi menekankan bahwa negara-negara menggunakan alat-alat ekonomi sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan strategis dan politik di kancah internasional. Kerangka ini menyoroti bahwa kekuatan ekonomi dapat menjadi sarana untuk mempengaruhi dinamika kekuatan global tanpa perlu menggunakan kekuatan militer secara langsung. (Blackwill and Harris, 2016).

Dalam konteks hubungan Tiongkok-AS, pendekatan geoekonomi dapat membantu memahami strategi ekonomi yang diterapkan kedua negara dalam upaya memperluas pengaruh mereka di tengah persaingan global yang semakin intens. Tiongkok, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, terus memperluas pengaruhnya melalui inisiatif seperti BRI dengan investasi infrastruktur yang masif di berbagai belahan dunia. Sedangkan Amerika Serikat dibawah pemerintahan Joe Biden bersama negara mitranya berupaya untuk memperkuat kembali aliansi ekonomi

serta membangun kebijakan domestik yang lebih kompetitif melalui program seperti PGII.

Menurut Blackwill dan Harris dalam buku mereka *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft* terdapat 7 instrumen geoekonomi, diantaranya adalah *trade policy*, *investment policy*, *economic sanctions*, *cyber*, *economic assistance*, *financial and monetary policy*, and *national policies governing energy and commodities*. 3 dari 7 instrument tersebut relevan dalam menganalisis persaingan investasi Tiongkok dan AS selama periode 2022-2024. Namun 4 instrumen lainnya seperti *trade policy*, *economic sanctions*, *cyber*, *financial and monetary policy* kurang relevan dan dominan jika digunakan untuk membedah data dari kedua inisiatif tersebut. Seperti *trade policy*, instrumen ini biasanya digunakan untuk menganalisis strategi negara dalam memanfaatkan tarif, kuota, atau perjanjian dagang guna memperoleh leverage geopolitik. Namun, dalam konteks penelitian ini, baik BRI maupun PGII lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur, investasi jangka panjang, dan dukungan finansial, bukan pada perubahan kebijakan perdagangan bilateral/multilateral secara langsung. Kemudian pada instrumen *Economic Sanctions* lazimnya digunakan dalam studi geoekonomi yang menyoroti upaya menekan negara lawan melalui pembatasan akses keuangan, teknologi, atau pasar. Namun, dalam rivalitas BRI vs PGII, baik Tiongkok maupun Amerika Serikat justru bersaing melalui soft power ekonomi berupa penyediaan pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Fokusnya bukan pada penalti atau hukuman, melainkan pada menarik dukungan negara berkembang melalui insentif ekonomi, sehingga instrumen sanksi tidak menempati posisi strategis dalam analisis ini. Selanjutnya instrumen *cyber* bisa digunakan sebagai alat geoekonomi jika didukung oleh negara dan bertujuan merugikan pihak lawan, seperti serangan di

bidang insfastruktur digital, maka dapat dilihat bahwasannya instrument *cyber* tidak relevan dengan kedua inisiatif BRI dan PGII dikarenakan target dari BRI dan PGII sendiri adalah untuk ekspansi menggunakan pembangunan infrastruktur strategis dan targetnya asalah negara miskin dan berkembang. Dan yang terakhir adalah instrumen *Financial and Monetary Policy*, ini biasanya relevan dalam studi yang menyoroti penggunaan cadangan devisa, suku bunga, atau stabilitas mata uang sebagai alat tekanan geoekonomi. Namun, pada konteks BRI dan PGII, yang menjadi titik tekan adalah pendanaan infrastruktur dan bantuan ekonomi melalui lembaga keuangan negara maupun multilateral. Meskipun terkait erat dengan aspek finansial, kebijakan moneter makro tidak ditampilkan secara eksplisit dalam inisiatif BRI maupun PGII.

Dalam analisis terhadap BRI, terlihat bagaimana Tiongkok menggunakan inisiatif tersebut untuk mencapai tujuan geopolitik dengan manfaat dari kekuatan ekonominya. Proyek infrastruktur yang didanai oleh BRI menunjukkan dampak signifikan pada peningkatan pengaruh geopolitik Tiongkok di berbagai kawasan. Sementara itu, PGII menunjukkan cara AS memanfaatkan inisiatif ini untuk melawan pengaruh Tiongkok dan mempertahankan posisi geopolitiknya dengan menawarkan alternatif yang lebih transparan dan bernilai jangka panjang. Proyek yang didanai PGII berkontribusi dalam menciptakan kestabilan dan kesejahteraan di negara-negara penerima, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dan strategis dengan AS menawarkan alternatif yang lebih transparan dan bernilai jangka panjang. Proyek yang didanai PGII berkontribusi dalam menciptakan kestabilan dan kesejahteraan di negara-negara penerima, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dan strategis dengan AS.

Dampak persaingan investasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh Tiongkok

dan AS, namun juga oleh negara-negara penerima investasi. Strategi yang diterapkan oleh kedua negara ini tidak hanya berdampak pada kekuatan mereka sendiri, tetapi juga pada dinamika global yang lebih luas, terutama di negara-negara penerima investasi. Konsep geoekonomi yang dikembangkan Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris menyoroti penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan strategis. Dalam buku mereka "*War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*" terdapat 7 indikator atau instrumen geoekonomi, dan berikut adalah beberapa instrument geoekonomi yang relevan dengan studi kasus penulis:

1. *Investment Policy*. Investasi digunakan sebagai alat geoekonomi dikarenakan beberapa tahun yang lalu terdapat pergeseran fokus dari perdagangan ke investasi sebagai instrument utama dalam hubungan internasional.
2. *Economic Assistance*. Bantuan ekonomi (bantuan militer, bantuan kemanusiaan, maupun bantuan Pembangunan) adalah salah satu alat geoekonomi klasik dan langsung. Kebanyakan negara menggunakan bantuan ini guna memperoleh pengaruh strategis, membentuk aliansi politik, dan memperkuat posisi geopolitiknya di kawasan tertentu.
3. *National Policies Governing Energy & Commodities*. Suatu kebijakan nasional negara dalam mengatur sumber daya energi dan komoditas strategis yang digunakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan politik serta strategis luar negeri.

Konsep geoekonomi relevan untuk menganalisis bagaimana kedua negara menggunakan proyek infrastruktur sebagai alat untuk memperluas pengaruh geopolitik mereka di berbagai wilayah, khususnya negara berkembang. Karena

kedua negara menggunakan investasi infrastruktur sebagai alat geoekonomi, persaingannya tidak hanya bersifat ekonomi namun juga politis., ketergantungan ekonomi negara-negara penerima investasi menciptakan hubungan asimetris yang dimanfaatkan untuk tujuan geopolitik.

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara pada penelitian ini menunjukkan jika persaingan investasi antara Tiongkok dan AS pada masa kepemimpinan Joe Biden adalah bentuk nyata dari strategi geoekonomi. Berdasarkan konsep Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris, terdapat tiga instrumen yang relevan yaitu *investment policy*, *economic assistance*, dan *national policies governing energy and commodities*. Tiongkok memanfaatkan BRI sebagai alat investasi strategis yang menciptakan ketergantungan ekonomi, sedangkan AS melalui PGII menawarkan alternatif pembiayaan yang transparan dan berkelanjutan. Selain itu, BRI dan PGII juga berfungsi sebagai bentuk bantuan ekonomi untuk memperkuat aliansi politik, dengan Tiongkok menggandeng AIIB dan CDB, sedangkan AS bermitra dengan MBDs. Keduanya juga menargetkan sektor energi dan infrastruktur strategis, karena penguasaan atas jalur distribusi energi dan komoditas menjadi instrument penting untuk mendukung kepentingan geopolitik luar negeri.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Melalui penggunaan metodologi kualitatif akan menghasilkan data dalam bentuk deskriptif selanjutnya dimasukkan ke dalam penelitian ini yang bersumber dari buku, jurnal, serta informasi yang didapat dari internet.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat dan Tiongkok kemudian untuk Objek pada penelitian ini adalah dinamika persaingan investasi yang terjadi antara kedua negara.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan untuk pengumpulan data. bahwa berbagai buku, makalah, artikel berita, serta laporan yang berkorelasi dengan rumusan masalah digunakan sebagai sumber penelitian. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, seperti buku, catatan, atau bukti-bukti yang telah dikumpulkan atau didapat secara tidak langsung melalui media perantara.

1.8.4 Proses Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan proses penelitian meliputi:

- a) Pra riset, mencari permasalahan serta mendefinisikan permasalahan yang layak untuk diteliti.
- b) Pengambilan data dengan pendekatan kepustakaan dengan cara mengumpulkan informasi dan referensi melalui media massa, laporan, jurnal, artikel, buku, catatan dan media sosial.
- c) Analisis data merupakan tahap terakhir, yaitu menganalisis data yang telah didapat. Langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dengan cara mengolah data menjadi informasi dan dituliskan pada penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

- a) **BAB I. Pendahuluan.** Bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, tinjauan pustaka, cakupan penelitian, kerangka pemikiran, argumen sementara dan metode penelitian.
- b) **BAB II. Persaingan Geoekonomi antara Tiongkok – Amerika Serikat pada Kepemimpinan Joe Biden Tahun 2022-2024.** Pada Bab ini penulis berupaya menjelaskan dengan rinci Persaingan investasi antara Tiongkok – Amerika Serikat pada kepemimpinan Joe Biden tahun 2022-2024. Dengan studi kasus BRI VS PGII.
- c) **BAB III. Analisis Teori Geoekonomi dalam Persaingan Investasi Tiongkok dan Amerika Serikat.** Pada bab ini penulis menjabarkan hasil analisis persaingan investasi Tiongkok dan Amerika Serikat dalam mempengaruhi dinamika kekuatan global dengan menggunakan Kerangka Pemikiran yang sudah ditulis di Bab 1.
- d) **BAB IV. Penutup.** Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan yang didapat dari penelitian dan juga rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut serta sebagai referensi.

BAB 2

PERSAINGAN GEOEKONOMI ANTARA TIONGKOK – AMERIKA SERIKAT PADA KEPEMIMPINAN JOE BIDEN TAHUN 2022-2024

Di era globalisasi, kini perang dengan menggunakan instrumen militer menjadi salah satu instrumen kuno dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya. Dalam pandangan masyarakat, konsep tentang perang tidak lagi hanya dipahami dalam konflik yang melibatkan senjata militer namun juga dalam bentuk lain seperti perang investasi menggunakan instrumen ekonomi. Hal ini terdeskripsikan dalam terminologi “*War by Other Means*” atau disebut perang dengan menggunakan instrumen lain (Blackwill and Harris, 2016). Sejak awal abad ke-21, fenomena yang paling menarik perhatian para akademisi dan pengambil kebijakan dunia adalah kebangkitan Tiongkok sebagai salah satu *global power*.

Tiongkok mulai menerapkan kebijakan menarik FDI sebesar-besarnya sebagai salah satu tonggak pembangunan ekonomi menggunakan deregulasi aturan-aturan investasi asing. Strategi yang digunakan Tiongkok yaitu lebih mempererat hubungan kerja sama pada bidang ekonomi dengan menciptakan jaringan perdagangan integratif, contohnya dengan dibentuknya inisiatif BRI sebagai perluasan bantuan ekonomi dengan investasi. Hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk negara maju secara ekonomi menciptakan ketergantungan kepada negara berkembang untuk mendapatkan atas apa yang mereka inginkan. Sehingga, tindakan ini mencerminkan sebuah pola hubungan kerja sama yang secara tidak langsung akan mengatur perilaku negara yang diberikan bantuan ekonomi.

Di sisi lain, AS pada masa pemerintahan Donald Trump menjalankan kebijakan luar negeri Isolasionisme, yaitu sebuah prinsip atau praktik politik dengan

menunjukkan minat hanya pada negaranya saja dan tidak terlibat pada kegiatan internasional (Taufik and Pratiwi 2021, 225). Oleh sebab itu setelah kepemimpinan Trump berakhir, Biden memahami bahwa dengan tidak terlibat dengan isu-isu global bukanlah pilihan yang baik dan bahwa isolasi tidak mungkin dilakukan lagi karena sumber-sumber kekuatan telah mengalami pergeseran, yaitu lebih menekankan pada kekuatan ekonomi.

Tiongkok untuk pertama kalinya menggeser AS sebagai tujuan utama investasi asing pada tahun 2020, membuat Biden menjanjikan perubahan kebijakan dalam berurusan dengan Tiongkok, ia berupaya membangun kembali hubungan dengan sekutu dan menyusun front persatuan melawan Tiongkok (AlAlkim 2021, 382). Salah satu upaya AS dalam menyusun strategi persatuan melawan Tiongkok adalah dengan didirikannya PGII bersama negara G7 pada tahun 2022 di KTT kepemimpinan G7 ke-48 di Jerman. Pembentukan PGII dibingkai sebagai alternatif geopolitik dari BRI Tiongkok, yaitu sebuah kemitraan infrastruktur berkualitas tinggi senilai \$600 miliar yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur di negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah (Moses and Zhu, 2022). Dengan menggunakan inisiatif masing-masing negara, nantinya akan dijelaskan dan dibandingkan fitur-fitur yang ada pada BRI dan PGII. Fitur-fitur yang berbeda akan memfasilitasi peluang bagi negara-negara penerima untuk memilih antara inisiatif-inisiatif tersebut sesuai dengan bagaimana mereka memenuhi permintaan proyek-proyek pembangunan serta pembiayaan negara penerima.

2.1 BRI: Strategi Tiongkok dalam Membangun Konektivitas Global

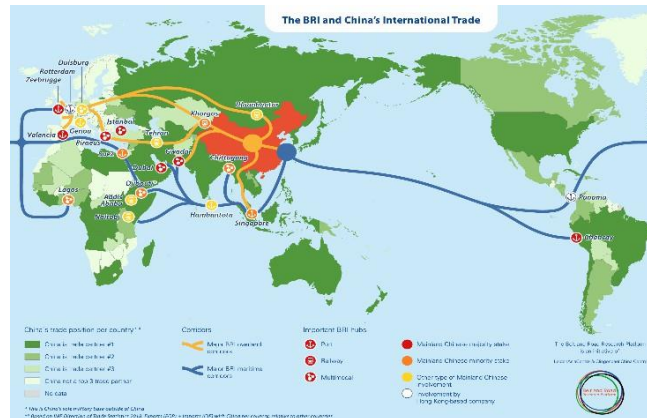
2.1.1 Latar Belakang Dibentuknya BRI

Awal mula Tiongkok mendirikan BRI pada tahun 2013 dibawah

kepemimpinan Xi Jinping didukung dengan terjadinya perdebatan di Tiongkok tentang arah kebijakan luar negeri, hal tersebut membuat Beijing mengadakan konferensi kerja penting. Pada konferensi tersebut Xi Jinping mengatakan jika negara-negara tetangga Tiongkok memiliki nilai strategis yang sangat signifikan serta menekankan pentingnya meningkatkan hubungan ekonomi dan kerja sama dengan negara-negara tersebut. Dibentuknya BRI Tiongkok berakar pada sejarah serta terinspirasi oleh jalur sutra yang memiliki sejarah dan luas jaringan jalur laut maupun darat untuk perdagangan serta pertukaran budaya antara Tiongkok dan negara-negara Eurasia. Abad yang gemilang tersebut menjadi inspirasi untuk Tiongkok mewujudkan jalur sutra kembali (Yu 2024, 1).

Dengan begitu Xi Jinping mendirikan BRI untuk menghubungkan ekonomi Tiongkok dengan Eurasia melalui infrastruktur, perdagangan, serta investasi. Serangkaian pidato-pidatonya di Astana dan Jakarta menjadi tanda dimulainya “*Belt and Road Initiative*”. Inisiatif tersebut memiliki 2 komponen utama yaitu “*the Silk Road Economic Belt*” sebagai jalur darat yang akan menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah, dan “*the 21st Century Maritime Silk Road*” sebagai jalur laut yang bertujuan menghubungkan provinsi pesisir Tiongkok dengan kawasan Asia Tenggara hingga Afrika melalui pelabuhan dan jalur kereta api (Cai 2017).

Gambar 2.1 Peta BRI Tiongkok



Sumber: Belt and Road Research Platform (2021)

Perkembangan terbaru dari BRI Tiongkok pada awal tahun 2025, keterlibatan Tiongkok melalui BRI mencapai tonggak tertinggi dalam sejarah inisiatif ini: tercatat \$66,2 miliar dalam kontrak konstruksi serta \$57,1 miliar dalam investasi, menandai periode enam bulan teraktif sejak peluncuran BRI. Secara substansial, sektor energi menjadi pusat ekspansi yang luar biasa: total keterlibatan energi mencapai \$42 miliar, tumbuh dua kali lipat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut mencakup USD 30 miliar dalam fasilitas pengolahan minyak dan gas, termasuk proyek berskala besar di Nigeria, dan pencapaian tertinggi dalam segmen energi hijau, yaitu USD 9,7 miliar diarahkan ke proyek tenaga angin, surya, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah (waste-to-energy), dengan total kapasitas terpasang mencapai sekitar 11,9 GW. Tidak hanya itu, sektor logam dan pertambangan juga mencetak prestasi baru, melewati rekor tahun penuh 2024 di hanya enam bulan pertama 2025, dengan USD 24,9 miliar, sebagian besar dalam investasi dan pemrosesan mineral (termasuk sekitar \$10 miliar khusus untuk pertambangan). Di sisi teknologi dan manufaktur, tercatat pula rekor baru hampir \$23,2 miliar, mencakup teknologi tinggi seperti panel surya (solar PV), baterai kendaraan listrik (EV), dan hidrogen—termasuk investasi di Nigeria. Dari sisi

geografis, Afrika dan Asia Tengah menjadi kawasan dengan keterlibatan BRI paling intens selama periode ini masing-masing mencatat \$39 miliar dan \$25 miliar menggeser posisi dominan kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, dominasi investasi mulai bergeser dari perusahaan milik negara ke sektor swasta, dengan nama-nama seperti East Hope Group, Xinfu Group, dan Longi Green Energy memimpin realisasi proyeknya. Secara kumulatif sejak tahun 2013, total keterlibatan BRI telah mencapai 1,308 triliun, terdiri dari \$775 miliar dalam kontrak konstruksi dan \$533 miliar dalam investasi non-keuangan menggarisbawahi eskalasi pesat sejak peluncuran inisiatif BRI (Wang, 2025).

2.1.2 *Komponen Utama BRI*

Jalur sutra adalah jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Timur dan Barat. Xi Jinping terinspirasi oleh kejayaan jalur sutra masa lalu yang membuatnya membuka kembali jalur tersebut. Ia menyebutnya sebagai *The Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road*. Tujuan dari proyek tersebut untuk menciptakan kerja sama di beberapa lorong ekonomi yang berfokus pada investasi proyek-proyek infrastruktur besar (jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, dan energi) yang menghubungkan lebih dari 60 negara di dunia. Nantinya proyek BRI ini akan dibagi menjadi dua, darat dan laut. Jalur perdagangan darat dikenal dengan Jalur Sabuk Ekonomi yang nantinya melintasi dari Eropa ke Asia Tengah dan Asia Timur. Sedangkan jalur laut dikenal dengan Jalur Sutra Maritim yang akan menghubungkan pelabuhan Tiongkok dengan beberapa pelabuhan sepanjang rute dari Laut Tiongkok Selatan, Samudera Hindia, Teluk Persia, Laut Merah hingga Teluk Aden (Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, 2017).

Jalur Sutra Maritim atau *Maritim Silk Road* (MSR) adalah komponen

dari inisiatif BRI yang fokus pada pengembangan jalur pelayaran serta infrastruktur pelabuhan di sepanjang rute laut dari Asia Tenggara ke Eropa. Tujuan utama dibentuknya MSR adalah untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan strategis Tiongkok khususnya di kawasan Indo-Pasifik karena termasuk wilayah penting dilihat dari geopolitik dan ekonomi. Seperti dibuat untuk memfasilitasi perdagangan internasional, mengurangi biaya logistik, serta mengamankan pasokan energi Tiongkok yang melalui jalur laut strategis seperti Selat Malaka. MSR juga berusaha memperluas pengaruh geopolitik Tiongkok dengan cara membangun hubungan yang lebih kuat bersama negara-negara di sepanjang rute. Selaras dengan visi dari MSR, bahwa akan membangun “*mutually- beneficial Blue Partnership*”, dimana negara-negara di sepanjang MSR akan memulai “Jalur pembangunan ramah lingkungan, kemakmuran berbasis laut, keamanan maritim, inovatif pertumbuhan dan tata kelola kolaboratif” (Green et al. 2018).

Negara-negara yang terlibat dalam proyek tersebut menerima investasi besar untuk pembangunan pelabuhan, jalan, serta fasilitas logistik. Namun hal tersebut membuat beberapa negara penerima investasi harus menghadapi risiko hutang yang cukup tinggi “*debt-trap diplomacy*”, dengan hal tersebut dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya menciptakan ketergantungan. Seperti kasus di Sri Lanka, yang menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Hambantota pada Tiongkok dikarenakan tidak mampu membayar hutangnya. Banyak kritik untuk proyek MSR karena dianggap kurang transparan dan menimbulkan kekhawatiran korupsi dan tata kelola yang buruk (Green et al. 2018).

Selain *Maritim Silk Road*, pemerintah Tiongkok juga melakukan investasi dalam proyek-proyek pembangunan seperti kereta api, jalan raya, jaringan pipa minyak gas, jaringan listrik, serta konektivitas lainnya untuk menyokong

keberlangsungan jalur darat yaitu *The Silk Road Economic Belt* (SREB), Sekitar 60 negara telah menyatakan minat mereka pada BRI. SREB memiliki tujuan untuk mengoptimalkan keseluruhan potensi pasar, perluasan investasi, mempromosikan kesejahteraan bersama lintas negara, dan kemudahan memperoleh akses geografis melalui menghubungkan Tiongkok dengan negara- negara di Asia, Eropa, dan Afrika (Iriawan 2020, 152). SREB mencakup jalur darat yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa melalui Asia Tengah, rute tersebut menjadi rute utama BRI untuk memfasilitasi perdagangan serta meningkatkan konektivitas Tiongkok dengan negara-negara di jalur darat.

SREB memberikan Tiongkok pengaruh yang lebih besar di kawasan Asia Tengah serta negara-negara yang berada di sepanjang jalur darat tersebut, seperti contohnya Kazakhstan menjadi jembatan antara Tiongkok dan Eropa melalui jalur darat dengan pembangunan rel kereta api, Kyrgyzstan mendapat dana mencakup pembuatan jalan raya dan jaringan transportasi, Pakistan merupakan proyek utama SREB melalui *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC), dan Turki yang menerima investasi untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan jalur kereta api, serta beberapa negara lain yang masuk dalam jalur darat BRI dan telah bergabung dalam proyek SREB. Tiongkok berusaha terus meningkatkan posisinya secara politik dan ekonomi di kawasan yang sangat penting ini (Rolland 2017, 111-113).

Gambar 2.2 Peta Jalur Sutra



Sumber: Xinhua News Agency

Proyek utama yang sudah dikembangkan di bawah naungan BRI meliputi Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), Koridor Ekonomi Tiongkok Mongolia-Rusia, serta Jembatan Darat Eurasia Baru. Sudah lebih dari 140 negara telah menandatangani BRI. Tiongkok telah meminjamkan lebih dari \$1 triliun kepada negara-negara berkembang serta menjadi salah satu kreditor dan investor terbesar bagi negara-negara berkembang (Tsuji 2024).

2.1.3 Pendanaan BRI

Proyek BRI merupakan proyek raksasa karena menghubungkan jalur laut dan darat di tiga benua yaitu Eropa, Asia, dan Afrika, serta mencakup $\frac{2}{3}$ populasi global dan $\frac{3}{4}$ sumber daya energi (ZiroMwatela and Changfeng 2016, 11). Pengeluaran Tiongkok untuk proyek raksasa ini diperkirakan mencapai \$100 miliar per tahun pada dekade akan datang. BRI adalah inisiatif yang didorong oleh negara. Sehingga, bank-bank dan perusahaan-perusahaan milik negara

Tiongkok memainkan peran dominan dalam pembiayaan infrastruktur dan konstruksi di luar negeri (Marbler and Shan 2017, 2).

Pendanaan utama BRI berasal dari bank-bank Tiongkok seperti *China Development Bank* (CDB) dan *China Exim Bank*, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan swasta Tiongkok yang berinvestasi pada proyek BRI seperti *China National Petroleum Corporation* (CNPC) dan *China Communications Construction Company* (CCCC), serta dari Pemerintah Tiongkok dengan menggunakan cadangan devisa negara dan hasil investasi luar negeri. Selain itu pendanaan untuk inisiatif ini diperkuat dengan pembentukan *Bank Investasi Infrastruktur Asia* (AIIB) pada tahun 2015, yang kini sudah beranggotakan 57 negara anggota (Marbler and Shan 2017, 2).

Tiongkok tidak secara mudah menggunakan istilah “bantuan” dan lebih memilih “kerja sama ekonomi dan teknis” dalam menggambarkan inisiatif BRI. Pendekatan tersebut menjaga kedudukan Tiongkok sebagai mitra yang setara, bukan sebagai donor yang memberi tanpa pamrih. Model pembiayaan pembangunan dari inisiatif BRI dengan karakteristik Tiongkok mencakup berbagai skema, seperti hibah, pinjaman tanpa bunga, pinjaman lunak, kredit ekspor lunak, dan investasi. Model pembiayaan BRI memperlihatkan jika Tiongkok bukan hanya memberikan bantuan, namun juga mencari manfaat ekonomi dan geopolitik dari kerja sama pembangunan (Liu, Xu, and Fan 2020).

Kritik tetap diterima oleh Tiongkok, yang paling sering diterima terhadap pendanaan BRI adalah banyak yang berargumen jika proyek-proyek yang didanai oleh Tiongkok dengan cara memberikan pinjaman dan investasi besar-besaran dari bank-bank Tiongkok, persyaratannya dianggap kurang transparan sehingga menyebabkan negara-negara penerima akan terjatuh dalam hutang yang tidak akan

bisa mereka bayar. Hal tersebut dikenal sebagai *debt-trap diplomacy* (diplomasi jebakan hutang), yang dimana Tiongkok dikatakan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang rendah secara ekonomi, dan ketika negara-negara tersebut tidak mampu melunasi hutangnya maka mereka terpaksa harus memberikan konsesi atau kepemilikan atas aset strategis mereka, seperti pelabuhan atau infrastruktur penting lainnya (Lai, Lin, and Sidaway, 2020), yang membuat Presiden Joe Biden menyebut BRI sebagai “*debt and noose agreement*” Perjanjian utang dan jerat (Tsuji 2024).

2.1.4 Dampak Ekonomi dan Politik Dari Inisiatif BRI Tiongkok

Inisiatif besar yang menargetkan infrastruktur dan jaringan komersial ini akan meluas ke seluruh Eurasia, sebuah area yang sangat penting secara geopolitik dan komersial. BRI tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur dan ekonomi, namun juga sebagai instrumen strategis yang mempunyai implikasi geopolitik yang mendalam. Dengan dibentuknya inisiatif BRI akan memperkuat hubungan antara Tiongkok dan negara-negara di sepanjang jalur BRI. Salah satu dampak geopolitik utama dari inisiatif BRI adalah peningkatan pengaruh Tiongkok di kawasan Eropa. Dengan investasi besar-besaran dalam proyek-proyek infrastruktur, Tiongkok berhasil melebarkan jejaknya di benua tersebut. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi bagi negara-negara Eropa yang menerima investasi dari Tiongkok melalui BRI. Pada kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur, BRI juga memiliki dampak geopolitik yang cukup besar (Banik, 2019).

Selain itu, BRI menciptakan persaingan geopolitik yang signifikan antara Tiongkok dengan kekuatan-kekuatan global lainnya, terutama Amerika Serikat. Proyek ini dianggap upaya Tiongkok untuk menentang dominasi Barat dalam

tatanan global dengan memperluas jaringan infrastruktur, investasi, dan perdagangannya. BRI berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan global, terutama dengan mengurangi dominasi AS dan sekutu-sekutunya. Dengan mendirikan jaringan infrastruktur dan investasi yang luas, Tiongkok berusaha membentuk tatanan internasional baru yang cenderung multipolar dan menguntungkan kepentingan nasionalnya. Banyak juga negara yang menerima investasi BRI menjadi ketergantungan secara ekonomi dan politik pada Tiongkok. Hal tersebut mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri serta domestik mereka, serta membatasi mereka untuk mengambil keputusan sendiri. Pada beberapa kasus, hal ini menimbulkan kekhawatiran “*debt-trap diplomacy*” (International Institute for Strategic Studies 2022).

BRI telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan di banyak negara. Walaupun kontraktor serta perusahaan konstruksi Tiongkok kerap yang melaksanakan proyek tersebut, Tiongkok mengklaim jika inisiatif tersebut telah menciptakan lebih dari 400.000 pekerjaan di negara tuan rumah dan membantu mengangkat lebih dari 40 juta orang keluar dari kemiskinan. Salah satu proyek BRI yang paling signifikan adalah CPEC, yaitu proyek bilateral untuk memfasilitasi perdagangan antara Tiongkok dan Pakistan. Diperkirakan bahwa investasi untuk proyek-proyek terkait CPEC sudah lebih dari \$60 miliar. Dengan melalui CPEC, ratusan mil jalan raya serta rel kereta api dan pembangkit listrik tenaga surya pertama dibangun di negara itu pada tahun 2010-an (Tsuji 2024).

2.2 PGII: Respon Amerika Serikat bersama G7 terhadap Tantangan Global

2.2.1 Latar Belakang Dibentuknya PGII

AS dan Tiongkok adalah dua pesaing strategis utama, sedang mencari

keterlibatan untuk membangun “kemitraan ekonomi” yang bertujuan untuk mendapatkan pengaruh/pengaruh yang lebih besar atas negara atau wilayah tertentu. Telah terjadi aktivitas yang intens secara global akhir-akhir ini, yang mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, serta diplomatik, yang mempengaruhi hubungan internasional. AS mendominasi periode pasca Perang Dunia II dan Tiongkok relatif baru dalam permainan ini. Akan tetapi, Tiongkok telah membuat langkah besar dalam mencari sekutu dengan cara memanfaatkan pengaruh ekonominya. Situasi tersebut memaksa AS dan negara-negara Barat lainnya untuk berinovasi dan mengambil inisiatif untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin meluas (Ehtisham 2022, 1-2).

PGII adalah versi yang diperbarui dari inisiatif B3W yang diumumkan pada pertemuan puncak G7 ke-47 pada bulan Juni 2021. PGII dirancang kembali untuk mengurangi ambisi dari inisiatif B3W yang dinyatakan untuk meningkatkan investasi infrastruktur sebesar \$40 triliun pada tahun 2035, akan tetapi banyak hal berubah dalam setahun terakhir setelah konflik Rusia-Ukraina mengganggu perekonomian Eropa yang mempengaruhi prioritas PGII ke depannya (Savoy and McKeown 2022). Selain itu rebranding dilakukan karena sejumlah alasan strategis dan politis. Pertama, pada implementasinya ternyata B3W mengalami hambatan dalam implementasi dan pendanaan; inisiatif ini hanya menjanjikan dana kecil dan tidak menarik perhatian internasional secara signifikan. Selain itu, nama B3W terlalu dekat dengan agenda domestik Presiden Biden (*Build Back Better Act*), yang mengalami kebuntuan legislatif, sehingga menimbulkan kebingungan antara kebijakan luar negeri dan dalam negeri AS.

PGII diluncurkan oleh G7 pada Juni 2022 sebagai upaya untuk memberikan alternatif yang lebih kredibel dan terkoordinasi terhadap BR Tiongkok. PGII

menekankan nilai-nilai demokratis seperti transparansi, keberlanjutan, dan inklusi sosial, serta berfokus pada mobilisasi dana publik dan swasta hingga 600 miliar dalam lima tahun. Pendekatan ini berbeda dari BRI yang lebih mengandalkan pembiayaan dari bank dan perusahaan milik negara. Secara geopolitik, rebranding ini mencerminkan reposisi Barat dalam persaingan infrastruktur global, dengan PGII sebagai instrumen soft power untuk menyaingi pengaruh ekonomi dan diplomatik Tiongkok melalui BRI (Hong Yu, 2024).

Sehingga dalam dua tahun masa jabatan Presiden Joe Biden, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2022, di KTT G7 ke-48, Presiden Biden dan negara-negara G7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Inggris) resmi meluncurkan Inisiatif baru yang disebut PGII untuk mendukung proyek infrastruktur di negara-negara berkembang serta sebagai penyeimbang inisiatif BRI Tiongkok dengan menyediakan alternatif yang lebih unggul bagi negara-negara miskin dan berkembang. Rencana Biden akan mengeluarkan memorandum untuk meluncurkan PGII di empat pilar prioritas pembangunan mencakup keamanan iklim dan energi, konektivitas digital, sistem kesehatan dan keamanan kesehatan, serta kesetaraan dan keadilan gender (Mariani 2023, 03).

AS bercita-cita untuk memperkuat diri mereka melawan Tiongkok di tingkat global untuk menegaskan kembali posisi ekonomi dan politik sentralnya; sebuah cara untuk mengambil alih kendali dalam permainan catur internasional. PGII juga akan melengkapi konsensus internasional yang ada mengenai penyediaan infrastruktur berkualitas bagi negara-negara dunia ketiga, yang dipimpin G7.

2.2.2 Komponen Utama PGII

PGII akan memobilisasi sumber daya publik dan swasta untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur utama, serta meningkatkan daya saing AS dalam

pembangunan infrastruktur internasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik di dalam maupun luar negeri. Dalam inisiatif ini, AS bekerja sama erat dengan G7 menuju pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan (SDGs), bersih, tangguh, inklusif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, dan transparan dalam pengelolaan dana juga pelaksanaan proyek, serta mematuhi standar tinggi agar dapat bertahan lama dan memberikan manfaat jangka panjang. Terdapat empat prioritas utama PGII yang berkaitan dengan infrastruktur penting untuk pembangunan yang kuat dalam beberapa dekade mendatang yaitu keamanan iklim dan energi, konektivitas digital, kesehatan dan keamanan kesehatan, dan kesetaraan serta keadilan gender (Executive Office of the President 2022).

PGII adalah peluang strategis bagi negara-negara berkembang untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta target agenda 2030. PGII sudah memberikan investasi di beberapa area yang menjadi prioritas utama untuk membantu mengatasi perubahan iklim dan krisis energi, ketahanan rantai pasokan, konektivitas melalui infrastruktur digital dan jaringan transportasi, sistem kesehatan berkelanjutan, dan kesetaraan gender, sehingga berkontribusi pada tujuan pembangunan global serta stabilitas ekonomi. Para menteri pembangunan G7 mengumumkan peningkatan upaya kolektif untuk mendukung proyek utama PGII antara lain, koridor-koridor pembangunan lintas batas yang penting, seperti Koridor Lobito, Koridor Transportasi Trans-Kaspia, serta Koridor Ekonomi Luzon, yang merupakan solusi yang terbukti untuk menarik investasi swasta dan mempercepat integrasi regional serta pembangunan berkelanjutan di negara-negara mitra. Inisiatif tersebut menandakan pendekatan ganda, yang mencakup proyek-proyek utama yang transformatif, termasuk

penyediaan infrastruktur keras, serta mempromosikan lingkungan yang mendukung dan kondisi hulu guna memobilisasi investasi infrastruktur (G7 Research Group 2024).

2.2.3 Pendanaan PGII

Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar di negara-negara berkembang, membutuhkan pendekatan baru pada pembangunan infrastruktur internasional yang menekankan investasi berstandar tinggi. Untuk memenuhi tantangan ini dan memanfaatkan peluang, PGII dirancang khusus untuk menawarkan pilihan pembiayaan yang komprehensif, transparan, serta berbasis nilai bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah untuk pembangunan infrastruktur.

Pada KTT G7 di Schloss Elmau, PGII mengumumkan tujuan kolektifnya untuk memobilisasi \$600 miliar pada tahun 2027 dalam investasi infrastruktur global, yang mana AS juga akan menyumbang \$200 miliar (U.S. Department of the Treasury 2022). Sebagai mitra utama PGII, AS akan berupaya memobilisasi potensi penuh dari berbagai alat keuangan pembangunan, termasuk Development Finance Corporation, USAID, EXIM, Millennium Challenge Corporation, dan US Trade and Development Agency (Ehtisham 2022, 2). Gagasan untuk pendanaan PGII akan terdiri dari kombinasi hibah pemerintah serta pendanaan dari negara-negara G7. Pendanaan tersebut akan memobilisasi khususnya dari *Multilateral Development Banks* (MDBs), dan memanfaatkan dana kekayaan negara serta modal swasta pelengkap dari dana pensiun, dana ekuitas swasta, dan dana asuransi, antara lain (Yu 2024, 146).

Kemitraan antara PGII dan MDBs sangat penting terhadap pelaksanaan proyek-proyek PGII. AS bersama G7 dapat memberikan alternatif yang kredibel

terhadap BRI Tiongkok dengan menggunakan MDBs sebagai lembaga pelaksana untuk membangun dan memelihara proyek infrastruktur di negara-negara berkembang sembari mengurangi ketergantungan pada dana hibah publik. Menteri Keuangan AS Janet Yellen, anggota penting proyek PGII, mengadakan pertemuan untuk membahas investasi infrastruktur global dengan para presiden MDBs, termasuk Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika, ADB, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, dan Bank Pembangunan Inter Amerika (U.S. Department of the Treasury 2022). Pemerintahan Biden bermaksud untuk membangun hubungannya dengan MDBs dalam upayanya untuk implementasi PGII di masa mendatang.

2.2.4 Dampak Ekonomi dan Politik Dari Inisiatif PGII AS Bersama G7

Dari segi ekonomi proyek-proyek PGII dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan yang terlibat. Misalnya Koridor Lobito, bukan hanya menghubungkan pelabuhan di Angola dengan provinsi Katanga di Republik Demokratik Kongo dan Copperbelt di Zambia, namun juga membuka potensi ekspor dan mendorong integrasi regional. Investasi pada sektor-sektor seperti agribisnis, infrastruktur digital, dan energi berkelanjutan akan meningkatkan ketahanan pangan dan akses energi, yang sangat utama bagi pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Kemudian proyek Koridor Transportasi Trans-Kaspia berpotensi menjadi rute perdagangan yang efisien antara Eropa dan Asia, proyek ini tidak hanya meningkatkan konektivitas namun juga menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi di Asia Tengah melalui investasi infrastruktur dan pelatihan teknis. Selain itu pada proyek Koridor Ekonomi Luzon akan memperkuat rantai pasokan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut melalui investasi dalam infrastruktur,

energi bersih, serta agribisnis (G7 Research Group 2024).

PGII tidak hanya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, namun juga untuk mendukung kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat dan sekutunya ucap Presiden Komisi Eropa di *Global Gateway Board* bulan Desember 2022, secara jelas menghubungkan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang dengan tujuan geopolitik. Seperti halnya inisiatif BRI, PGII jauh lebih dari sekedar tujuan mendukung negara-negara berkembang melalui proyek infrastruktur, serta perlu dianggap dalam konteks persaingan strategis antara Tiongkok dan AS bersama sekutu baratnya. Dengan PGII, G7 menawarkan alternatif bagi BRI yang lebih mencerminkan nilai, standar, serta cara berbisnis anggota G7 sembari bersaing dengan Tiongkok atas dasar geoekonomi untuk meningkatkan rantai pasokan dan meningkatkan pangsa pasar global (Mariani 2023).

Dengan menawarkan model pembangunan yang lebih sesuai standar internasional dan nilai-nilai demokrasi, AS melalui PGII berpotensi mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang pada investasi dari Tiongkok serta meningkatkan kerja sama multilateral. BRI sering dikritik karena kurangnya transparansi dan berpotensi menciptakan utang yang tidak berkelanjutan bagi negara-negara penerima. Berbeda dengan PGII yang tidak hanya menjanjikan kuantitas investasi namun juga kualitasnya seperti proyek-proyek yang layak secara ekonomi yang transparan dan risiko lingkungan, sosial, serta ESG yang rendah. Dengan demikian dinyatakan secara terbuka dalam karakteristik PGII ini kontras dengan proyek-proyek BRI Tiongkok. AS bersama G7 bertaruh jika investasi seperti itu akan lebih menarik bagi pemerintah negara tuan rumah dari pada yang ditawarkan oleh Tiongkok. Meski begitu, efektivitas PGII akan sangat

bergantung pada implementasi konkret dari proyek-proyek yang didukung dan sejauh apa negara-negara berkembang bersedia berpartisipasi dalam inisiatif tersebut (Lasos and Fetter 2022).

2.3 Perbandingan Inisiatif BRI Tiongkok dan PGII Amerika Serikat dan G7

Pembentukan BRI oleh Tiongkok telah dilakukan lebih dulu dibandingkan PGII, BRI telah diluncurkan oleh Tiongkok pada tahun 2013 untuk menangani jurang pembiayaan infrastruktur di *Global South*, dengan secara tersirat untuk meluaskan pengaruh globalnya melalui pembangunan infrastruktur yang nantinya akan menciptakan ketergantungan ekonomi pada Tiongkok dan mengurangi ketergantungan pada blok Barat terutama AS. BRI dikenal mempunyai dua jalur yang disebut “*Silk Road Economic Belt*” dan “*21st Century Maritime Silk Road*”, yang saat itu masih dijuluki dengan OBOR. Namun, seiring berjalannya waktu OBOR di rubah nama menjadi BRI. Sedangkan PGII didirikan oleh G7 termasuk AS sebagai aktor pemrakarsanya setelah hampir 1 dekade BRI diluncurkan yaitu pada tahun 2022 di KTT G7 ke-48 di Jerman. PGII terdiri dari negara G7 yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat. PGII adalah hasil rebranding dari inisiatif B3W, yang diumumkan pada tahun 2021. Tujuan PGII adalah menawarkan alternatif pembangunan infrastruktur terhadap BRI Tiongkok dengan menilai keberlanjutan, transparan, dan inklusif. Serta tentu saja untuk menciptakan peluang ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok (Knowledge Management Center, IRIS Institute 2024).

Dalam aspek pendanaan, Skala proyek BRI tergolong besar, 13% proyek BRI berskala mega, menghabiskan lebih dari 50% dari total pengeluarannya (Knowledge Management Center, IRIS Institute 2024). BRI lebih cenderung

mendukung proyek infrastruktur “keras” seperti pelabuhan, jalan raya, rel kereta api, bendungan, pembangkit listrik, serta fasilitas telekomunikasi karena keunggulan komparatif Tiongkok dalam hal biaya serta perputaran proyek dalam infrastruktur tradisional. Beberapa proyek ini membutuhkan modal yang besar, dan bank-bank kebijakan Tiongkok telah mendukung proyek-proyek besar tersebut secara finansial. Pembiayaan BRI ke negara tuan rumah bergantung pada pinjaman bilateral publik (konsesi dan komersial) serta investasi yang didukung oleh bank dan dana milik pemerintah, Tiongkok juga sering menginvestasikan dana yang sangat besar dalam waktu singkat. Namun meskipun Tiongkok mampu memberikan pinjaman dan investasi yang cukup besar, ternyata inisiatif tersebut juga bisa menjadi beban yang signifikan bagi keuangan negara-negara penerima dengan mendorong ke ambang kehancuran ekonomi, pasalnya Tiongkok dianggap kurang transparan sehingga menyebabkan negara-negara penerima akan terjat dalam hutang yang tidak akan bisa mereka bayar.

Sebaliknya PGII lebih menargetkan proyek infrastruktur “lunak”, yaitu peningkatan iklim, kesehatan dan keamanan kesehatan, teknologi digital yang modernisasi, serta kesetaraan gender dan keadilan gender. Jenis-jenis proyek tersebut dibiayai sejumlah kecil dana publik yang dimaksudkan untuk mengkatalisis keterlibatan sektor swasta. Pembiayaan PGII berasal dari upaya memanfaatkan hubungan bilateral dan multilateral untuk mengumpulkan modal ratusan miliar. Dengan begitu, meskipun harga yang dijanjikan PGII sangat besar, namun tidak ada jaminan bahwa pemerintah G7 akan mampu memenuhi komitmen mereka selama lima tahun mendatang, jika mengingat volatilitas politik di Sebagian besar negara G7. Terlebih lagi pemerintah ini tidak mempunyai kendali nyata atas apakah sektor swasta benar-benar akan menginvestasikan bagian mereka yang

merupakan mayoritas janji PGII atau bahwa mereka akan memilih proyek yang berkelanjutan. Selain itu, atribut berkualitas tinggi yang membuat proyek menarik juga membatasi jumlah dan cakupan proyek yang dapat memenuhi persyaratan PGII. Melibatkan sektor swasta merupakan tantangan dan kapasitas pendanaan publik saat ini terlalu rendah untuk memberikan kontribusi substansial dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur global. Bahkan jika PGII mampu memobilisasi dana \$600 miliar termasuk \$200 miliar dari AS, jumlah tersebut tidak mungkin menghalangi atau menggantikan investasi Tiongkok. Kesenjangan infrastruktur di negara-negara berkembang sangat besar, dalam skala puluhan triliun dolar (Lasos and Fetter 2022).

Dalam aspek ekonomi dan politik, BRI lebih berfokus menawarkan pada investasi berskala besar pada infrastruktur fisik yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan menginvestasikan dana yang sangat besar dalam waktu singkat, namun beresiko ketergantungan ekonomi dan hutang yang berlebihan pada negara-negara mitranya. Hal tersebut juga dijadikan kesempatan bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya. BRI juga menjadi instrumen bagi Tiongkok untuk memperkuat pengaruh geopolitiknya di berbagai kawasan, kerap kali dengan meningkatkan ketergantungan politik negara penerima. Sedangkan PGII disisi lain lebih menekankan pada kualitas investasi dan keberlanjutan dengan lebih memperhatikan faktor ESG serta dampak jangka panjang bagi negara-negara mitranya yang berpotensi lebih menguntungkan dalam jangka panjang, membuat negara-negara berkembang merasa lebih percaya diri dalam mengelola investasi tersebut tanpa resiko terjebak dalam hutang yang berlebihan. PGII juga lebih berorientasi pada penguatan hubungan politik dengan negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan negara berkembang

pada investasi Tiongkok melalui investasi dengan nilai-nilai demokrasi serta standar tinggi.

Biden memang berhasil mewujudkan rencana menyatukan sekutu terdekat Washington dalam menghadapi Tiongkok, alasan utamanya tentu saja rasa saling menguntungkan, namun langkah politik Biden tidak akan mudah terwujud dalam bentuk tindakan. Butuh banyak upaya daripada hanya sekedar kata-kata melihat kemajuan Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tidak bisa ditahan. Memang tidak ada yang salah dengan hubungan AS bergabung dengan sekutunya G7 untuk memberikan kecaman terhadap Tiongkok, retorika tersebut setidaknya merupakan sebuah langkah bagi Presiden AS. Biden berusaha menyatukan mitra diplomatiknya untuk melawan apa yang dirasakan Washington sebagai ancaman terbesar pada perdagangan, teknologi, dan aspek strategis lainnya seperti investasi besar-besaran. Namun, disisi lain sulit untuk negara-negara G7 menahan laju pergerakan Tiongkok. Pada akhirnya upaya Biden menggalang sekutunya untuk melawan Tiongkok akan menciptakan hambatan alami dalam membangun kerja sama karena cakupan modal dan pengalaman Tiongkok lebih maju (Oktaveri 2021).

BAB 3

ANALISIS TEORI GEOEKONOMI DALAM PERSAINGAN GEOEKONOMI TIONGKOK DAN AMERIKA SERIKAT MELALUI INISIATIF BRI DAN PGII

Istilah geoekonomi pertama kali dikemukakan oleh ahli strategi AS Edward Luttwak pada tahun 1990, Luttwak menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul “*From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce*” jika dunia mengalami pergeseran dari strategis militer menuju strategi ekonomi atau geoekonomi. Ia berpendapat negara-negara tidak lagi mengandalkan ancaman militer untuk mencapai kepentingan strategisnya disebabkan dengan berakhirnya perang dingin, kekuatan militer semakin kehilangan relevansinya sebagai instrumen utama dalam hubungan internasional, sehingga beralih ke alat ekonomi sebagai instrumen utama dalam persaingan global (Luttwak 1990, 17-23). Seperti halnya yang terjadi pada Tiongkok dan AS pada masa kepemimpinan Joe Biden, kedua negara tersebut mengandalkan instrumen ekonomi mereka yaitu investasi sebagai bentuk persaingan globalnya. Kesenjangan pendanaan infrastruktur di negara-negara berkembang yang membutuhkan dana yang sangat besar menciptakan sebuah peluang bagi negara adidaya meluaskan dominasinya dengan menciptakan sebuah inisiatif pembangunan infrastruktur.

Inisiatif tersebut adalah BRI yang didirikan Tiongkok dan PGII yang didirikan G7 dan AS sebagai negara pemrakarsanya, kedua inisiatif tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, namun secara tersirat inisiatif AS yang baru dibentuk setelah satu tahun Biden menjabat di bingkai sebagai bentuk penyeimbang dari inisiatif BRI Tiongkok yang sudah sejak tahun 2013 berdiri dan meluaskan

dominasinya dengan melalui investasi infrastruktur. Persaingan dalam bidang investasi tersebut merupakan salah satu manifestasi utama dari dinamika geoekonomi global yang mengacu pada penggunaan alat ekonomi untuk tujuan strategis suatu negara, dalam konteks hubungan Tiongkok-AS, terlihat melalui kebijakan investasi pada negara-negara penerima.

Inisiatif BRI telah menghasilkan investasi besar dalam beberapa aspek dan kawasan, seperti infrastruktur transportasi di beberapa koridor utama, di sektor teknologi Tiongkok berhasil meningkatkan investasi di luar negeri, kemudian diversifikasi impor energi, dan sempat mengusung *Health Silk Road* ketika peran Tiongkok meningkat saat COVID-19 tapi belum memiliki dampak jangka panjang. BRI dipandang sebagai bagian dari strategi geoekonomi Tiongkok, yang memanfaatkan pembiayaan pembangunan untuk merongrong hegemoni AS. Selain keberhasilan, inisiatif ini juga menghadapi tantangan dengan penurunan permintaan infrastruktur berskala besar karena faktor utang negara penerima pinjaman. Respon dari Barat melihat keberhasilan BRI telah mendorong Barat untuk membuat inisiatif alternatif seperti B3W dari AS yang telah direbranding menjadi PGII dari G7 (International Institute for Strategic Studies 2022, 9-10).

Dalam pandangan Biden, pembangunan infrastruktur akan menjadi arena penting bagi AS untuk bersaing dengan Tiongkok. Biden menjalankan inisiatif yang serupa dengan BRI yaitu PGII dengan menyatukan sekutu-sekutunya untuk membantu negara-negara berkembang meningkatkan infrastruktur mereka.

PGII berpotensi menawarkan pilihan kepada negara-negara berkembang untuk mencari pinjaman eksternal untuk membiayai pembangunan infrastruktur selain pendanaan dari BRI Tiongkok. Sementara itu, beberapa kawasan menolak BRI dengan alasan jika proyek infrastruktur yang diinvestasikan oleh Tiongkok mahal

serta tidak praktis, dengan transaksi internal yang didukung masalah korupsi. Tiongkok dan AS kini bersaing ketat untuk memperebutkan pengaruh atas negara-negara berkembang di seluruh dunia (Yu 2024, 145).

Keputusan AS untuk bersaing dengan Tiongkok dalam hal infrastruktur mencerminkan kekhawatiran bahwa AS kehilangan pengaruh dan prestise di negara-negara berkembang yang beralih ke Tiongkok, serta tantangan dampak Tiongkok yang terus meningkat terhadap norma-norma dan lembaga-lembaga global. Negara-negara besar barat secara eksplisit mengidentifikasi Tiongkok melalui BRI sebagai pesaing strategis yang mengancam keamanan dan kemakmuran mereka serta “tatanan berbasis aturan” yang mereka junjung tinggi. Secara luas BRI dipandang sebagai strategi besar yang jahat, yang menentang hegemoni AS dengan memperluas pengaruh Tiongkok, hal tersebut menjadi alasan mengapa AS Bersama G7 memutuskan untuk memberikan alternatif bagi negara-negara berkembang (Hameiri and Jones 2023, 698).

Persaingan Investasi antara Tiongkok dan AS melalui inisiatif BRI dan PGII yang terjadi menggambarkan bagaimana kedua negara tersebut saling berkompetisi menjadi hegemoni ekonomi terbesar dunia. Baik AS maupun Tiongkok keduanya saling mengupayakan strategi serta berbagai pendekatan pada kawasan-kawasan di belahan dunia untuk menyuntikkan pengaruhnya pada negara-negara di kawasan tersebut. Terdapat teori yang seiring berjalannya waktu teori tersebut dikembangkan lanjut oleh para ahli dan implementasinya sangat relevan dalam menghadapi situasi ekonomi global yang terjadi ditengah persaingan kedua negara tersebut, yaitu konsep geoekonomi oleh Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris yang dijelaskan dalam bukunya *"War by Other Means: Geo- Economics and Statecraft"*.

Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris memandang “geoekonomi” adalah sebuah cara bagaimana negara membangun serta menggunakan kekuasaan dengan mengacu pada faktor-faktor ekonomi dan bukan faktor geografis. “Penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan serta membela kepentingan nasional, dan untuk menghasilkan hasil geopolitik yang bermanfaat; dan dampak tindakan ekonomi negara lain terhadap tujuan geopolitik suatu negara”. Definisi tersebut merupakan titik awal dalam membuat konsep geoekonomi. Beberapa alat kebijakan ekonominya adalah *trade policy, investment policy, economic sanctions, cyber, economic assistance, financial and monetary policy, and national policies governing energy and commodities*. Mereka membahas konsep geoekonomi dimana negara-negara menggunakan kekuatan ekonomi mereka sebagai cara untuk mempengaruhi negara lain tanpa harus menggunakan kekuatan militer secara langsung. Blackwill dan Harris menjelaskan terdapat 7 instrumen geoekonomi yang mendeskripsikan bentuk geoekonomi, berikut beberapa instrumen yang relevan dalam kasus persaingan investasi antara Tiongkok dan AS yaitu: 1) *Investment policy*; 2) *Economic assistance*; 3) *National policies governing energy and commodities* (Blackwill and Harris 2016).

3.1 Investment Policy

Pada zaman dahulu tepatnya 40 tahun yang lalu, hampir seluruh arus lintas negara berbasis perdagangan. Akan tetapi, kini 90% berbasis keuangan dan investasi, baik investasi jangka pendek maupun investasi langsung jangka panjang (FDI). Kebijakan investasi sebagai alat geoekonomi merujuk pada penggunaan investasi lintas negara yang dikendalikan oleh negara (*state-led*) baik melalui perusahaan milik negara (BUMN), dana kekayaan negara, atau bank milik negara untuk mencapai kepentingan strategis serta politik luar negeri, bukan sekedar

keuntungan ekonomi (Blackwill and Harris 2016, 53-58).

Di lihat dari pandangan geoekonomi, investasi kini jauh lebih penting daripada sebelumnya karena volumenya yang sangat besar secara relative maupun absolut. Selain itu, arus investasi meningkat besar-besaran khususnya ke negara berkembang. Penggunaan instrumen investasi pada persaingan antara Tiongkok dan AS dapat dilihat dari pemberian investasi oleh Tiongkok dan AS melalui inisiatifnya yaitu BRI dan PGII, BRI dirancang untuk mengatasi masalah domestik sekaligus memperkuat konektivitas global melalui pembangunan infrastruktur yang dimana salah satu model pendanaannya menyediakan investasi besar-besaran bagi negara penerimanya terutama di negara-negara berkembang.

Misalnya pada tahun 2023, inisiatif BRI Tiongkok mencakup pendanaan serta investasi di setidaknya 61 negara. Sebaran wilayah tujuan pendanaan BRI memperlihatkan strategi geoekonomi Tiongkok yang menargetkan berbagai Kawasan strategis, mulai dari Asia Timur hingga Afrika Sub-Sahara. Telah tercatat beberapa wilayah utama penerima investasi BRI meliputi Asia Timur yang menjadi salah satu Kawasan prioritas dengan total investasi sebesar \$6,8 miliar dan telah meningkat sebesar 94% dari pada tahun sebelumnya, kemudian Amerika Latin yang mengalami lonjakan investasi signifikan mencapai \$5,5 miliar yang mewakili sekitar 20,5% dari total investasi BRI pada tahun tersebut, selanjutnya adalah wilayah Pasifik yang menerima investasi sebesar \$170 juta, dan yang terakhir adalah Afrika Sub-Sahara menunjukkan tren peningkatan dengan kenaikan investasi sebesar 130% dibanding dengan periode sebelumnya (Wang 2024).

Secara negara, terdapat 3 negara penerima investasi terbesar dari BRI pada tahun 2023 antara lain adalah, Indonesia dengan total nilai investasi sebesar \$7,3 miliar menjadikannya negara penerima terbesar pada tahun tersebut, Hungaria

menempati posisi kedua dengan total investasi sebesar \$4,5 miliar, dan terakhir Peru dengan investasi mencapai \$2,9 miliar (Wang 2024).

Arena persaingan investasi Tiongkok yang sama dengan PGII salah satunya berada di negara Indonesia. Pada sektor energi terbarukan Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan beragam. Hal ini tercermin dalam Forum Bisnis Indonesia–Tiongkok yang diselenggarakan di Beijing, di mana ditandatangani sebelas kesepakatan bernilai sekitar US\$12,6 miliar dengan fokus utama pada pengembangan baterai kendaraan listrik serta proyek energi bersih. Selain itu, pada awal tahun yang sama, perusahaan Xinyi Glass Holdings dari Tiongkok dibawah inisiatif BRI juga mengumumkan rencana investasi sebesar \$11,5 miliar untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa di Pulau Rempang, Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam mendukung produksi panel surya (Interesse, 2024). Selain di Indonesia BRI dan PGII juga sama-sama berinvestasi di Afrika. Salah satu proyek utama BBRI di Afrika adalah pembangunan *Mombasa–Nairobi Standard Gauge Railway (SGR)* di Kenya. Proyek ini bernilai sekitar \$3,2–3,6 miliar, dengan sebagian besar pendanaannya berasal dari Exim Bank of China. Investasi dalam skala besar ini menunjukkan orientasi BRI yang menekankan pembangunan infrastruktur fisik sebagai instrumen geoekonomi Tiongkok. Melalui proyek SGR, Tiongkok tidak hanya memperkuat keterhubungan transportasi di kawasan Afrika Timur, tetapi juga memperluas pengaruh ekonominya dengan menciptakan ketergantungan struktural negara penerima terhadap modal, teknologi, dan tenaga kerja Tiongkok. Dengan demikian, BRI memainkan peran penting dalam memperdalam integrasi ekonomi Afrika dengan Tiongkok serta memperkokoh posisinya sebagai mitra pembangunan utama di kawasan.

Data tersebut menunjukkan bagaimana Tiongkok melalui BRI secara

strategis menyebarkan investasinya ke berbagai wilayah sebagai alat untuk memperluas pengaruh geekonominya secara global, khususnya di negara berkembang serta Kawasan dengan nilai strategis tinggi. Maka kita melihat bahwa Tiongkok menunjukkan keterbukaan ekonomi dengan instrumen investasi dalam pembangunan untuk membuka dunia hegemoni (Erba 2024, 130).

Di sisi lain, Presiden Biden dan inisiatif infrastruktur andalan G7 yaitu PGII, juga telah menarik investor besar untuk menanggapi lebih baik permintaan global akan pembiayaan infrastruktur berkualitas tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah juga menengah. Sejak didirikan, para Pemimpin G7 melalui PGII, mulai bekerja menuju tujuan untuk memobilisasi modal senilai \$600 miliar untuk infrastruktur di negara berkembang, dengan progres hingga akhir 2024 mencapai lebih dari \$60 miliar (G7 Development Ministers 2024). Dalam pembiayaan infrastruktur bersama-sama, mereka mengidentifikasi untuk lebih memobilisasi investasi infrastruktur, dengan berfokus pada pemanfaatan modal swasta guna memaksimalkan alur proyek.

Beberapa bentuk konkret dari investasi PGII yang telah direalisasikan hingga tahun 2024 menunjukkan fokus Kawasan serta sektor yang beragam. Misalnya, DFC menginvestasikan sebesar \$48 juta di India dalam sektor logistik dan ketahanan pangan, khususnya untuk mendukung distribusi dan pengelolaan rantai pasok gandum. Investasi ini menunjukkan keterlibatan DFC dalam pembangunan sektor strategis yang tidak hanya bersifat komersial tetapi juga mendukung stabilitas pangan di kawasan Asia Selatan. Di Kawasan Amerika Latin dan Karibia, Lembaga seperti DFC serta IDB Invest masing-masing menyediakan pembiayaan sebesar \$50 juta dalam skema kerja sama pembiayaan bersama (*co-financing*) guna mendukung proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. Di benua

Afrika, keterlibatan DFC juga tampak dalam pembangunan Koridor Lobito, yang menghubungkan Angola, Republik Demokratik Kongo, dan Zambia. Melalui koridor ini, DFC memberikan dukungan investasi untuk pengembangan infrastruktur transportasi dan energi lintas negara, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas kawasan, tetapi juga menciptakan fondasi bagi integrasi ekonomi regional yang lebih dalam. Investasi ini dikategorikan sebagai bentuk kemitraan infrastruktur publik–swasta, yang mencerminkan strategi geoekonomi AS dalam mengimbangi pengaruh Tiongkok di Afrika melalui inisiatif BRI (G7 Development Ministers 2024).

Investasi PGII yang berada di arena sama dengan inisiatif BRI Tiongkok pada negara Indonesia adalah, PGII berinvestasi pada proyek pengembangan teknologi energi bersih melalui *Small Modular Reactor* (SMR). Indonesia ditetapkan sebagai mitra pertama di kawasan ASEAN dalam proyek percontohan SMR yang digagas oleh perusahaan Amerika Serikat, NuScale Power. Untuk mendukung proyek ini, PGII melalui lembaga-lembaga pendanaan AS telah mengalokasikan dana sebesar \$3,4 juta, terdiri dari \$1 juta untuk penguatan kapasitas teknis dan regulasi, serta \$2,4 juta untuk studi kelayakan yang difasilitasi oleh USTDA. Selain itu, DFC telah menandatangani *Letter of Interest* untuk mendukung pengembangan SMR di Indonesia secara lebih luas (Biro Pers, 2023).

Kemudian untuk investasi PGII di Afrika berbeda dengan pendekatan investasi BRI di Afrika, inisiatif PGII yang dipimpin AS bersama negara-negara G7 berfokus pada proyek yang mendukung keberlanjutan dan rantai pasokan mineral strategis. Salah satu implementasi utamanya adalah Koridor Ekonomi Lobito, yang menghubungkan Angola, Zambia, dan Republik Demokratik Kongo (DRC). Proyek ini memperoleh komitmen investasi awal sekitar \$2,0 miliar dari

G7, dengan tambahan pendanaan melalui *loan* dari DFC sebesar \$553 juta, serta dukungan tambahan dari Pemerintah AS sebesar \$600 juta. Secara keseluruhan, paket investasi ini menunjukkan pendekatan multilateral PGII yang menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan pengamanan akses terhadap mineral strategis, khususnya tembaga dan kobalt, yang esensial dalam transisi energi global. Dengan strategi tersebut, PGII tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas kawasan, tetapi juga menegaskan upaya Amerika Serikat untuk menyaingi dominasi Tiongkok di Afrika melalui jalur geoekonomi yang lebih terfokus pada keberlanjutan dan energi bersih (The White House 2023).

Dengan demikian, meskipun keduanya memanfaatkan instrumen yang sama yaitu investasi lintas negara, BRI dan PGII mencerminkan dua model geoekonomi yang berbeda. BRI dengan pendekatan negara-sentris serta massif, sedangkan PGII dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi terhadap nilai-nilai tata kelola global. Kedua inisiatif ini saling berkompetisi dalam menciptakan pengaruh di kawasan *Global South*, dan sekaligus mencerminkan pertarungan hegemonik antara Tiongkok dan AS di era kontemporer melalui instrumen ekonomi, bukan senjata militer.

3.2 *Economic Assistance*

Menurut Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris, *economic assistance* adalah salah satu instrument geoekonomi yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan strategis dan geopolitik melalui bantuan ekonomi. Bantuan ini bisa berupa hibah, bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, atau juga bantuan militer, yang diberikan kepada negara lain dengan tujuan memperkuat aliansi politik, membentuk ketergantungan ekonomi, atau juga meningkatkan pengaruh diplomatik. Dalam buku mereka *War by Other Means: Geoeconomics and*

Statecraft, Blackwill dan Harris menjelaskan bahwa *economic assistance* kerap digunakan sebagai alat untuk membangun hubungan strategis dengan negara mitra, khususnya di kawasan yang mempunyai kepentingan geopolitik bagi negara pemberi bantuan. Mereka menekankan bahwa bantuan ekonomi bilateral memiliki nilai geoekonomi yang jelas karena disalurkan dengan motivasi strategis, bukan semata-mata kepentingan pembangunan (Blackwill and Harris 2016, 69-74).

Bantuan ekonomi bilateral dalam bentuk pinjaman serta dukungan proyek pembangunan juga kerap kali digunakan bukan semata-mata untuk Pembangunan, namun untuk mendapatkan dividen geopolitik. Mereka menyebut jika bantuan semacam ini adalah salah satu bentuk paling eksplisit dari instrument geoekonomi, karena memberikan kekuatan ekonomi yang dapat diarahkan untuk mendapatkan pengaruh strategis.

Dalam konteks inisiatif BRI, Tiongkok memanfaatkan bantuan ekonomi dalam bentuk pinjaman lunak, dukungan proyek infrastruktur, serta investasi jangka panjang untuk melebarkan pengaruhnya di negara-negara berkembang. Lembaga-lembaga keuangan milik negara seperti *China Development Bank* (CDB) dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) menjadi instrument utama dalam menyalurkan pembiayaan tersebut. Skema ini sering kali dikemas sebagai kerja sama ekonomi, namun pada dasarnya memiliki dimensi strategis yang mendalam, seperti kontrol atas jalur perdagangan, pelabuhan strategis, serta sumber daya energi.

Beberapa analisis melihat BRI menyebabkan apa yang disebut sebagai “*debt-trap diplomacy*”, tidak hanya pada investasi, namun pada bantuan ekonomi negara penerima juga terjebak dalam utang besar dan akhirnya harus menyerahkan aset strategis. Sebagai contohnya adalah pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, yang jatuh

pada Tiongkok melalui skema sewa jangka panjang setelah Sri Lanka gagal membayar utangnya. Sri Lanka tidak bersedia memberikan dana senilai \$1,1 miliar pada Tiongkok untuk membiayai pembangunan Pelabuhan Hambantota, kedua negara akhirnya sepakat untuk melakukan pengaturan di mana Tiongkok mentransfer dana yang setara dengan jumlah pinjaman (\$1,1 miliar) kepada pemerintah Sri Lanka dengan imbalan kepemilikan saham sebesar 85% di perusahaan pelabuhan tersebut berdasarkan konsesi selama 99 tahun (Hurley 2018).

Sebagai respon dari perluasan pengaruh Tiongkok melalui BRI, AS meluncurkan inisiatif PGII dengan tujuan menawarkan bantuan ekonomi serta investasi infrastruktur yang bersifat transparan, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai tata kelola global. Pada konteks geoekonomi, selain sebagai alat investasi, PGII juga sebagai alat bantuan ekonomi strategis yang digunakan oleh AS untuk memperkuat kembali pengaruhnya di negara-negara berkembang dan menyeimbangkan dominasi geoekonomi Tiongkok.

AS memanfaatkan jaringan lembaga Pembangunan seperti *U.S International Development Finance Corporation* (DFC), USAID, serta *Multilateral Development Banks* (MDBs) sebagai mitra utama untuk menyalurkan bantuan pada negara-negara mitra. Bantuan tersebut bisa berupa hibah, jaminan investasi, pinjaman preferensial, dan kerja sama teknis dan strategis. Dalam kerangka inisiatif PGII, bentuk bantuan ekonomi yang diberikan AS juga diwujudkan melalui hibah serta bantuan teknis yang dikelola oleh Lembaga seperti USAID dan USTDA. Misalnya, USAID memberikan hibah sebesar \$5 juta untuk perluasan layanan uang seluler di Angola, yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekosistem pembayaran digital yang inklusif. Selain itu, USTDA memberikan hibah studi kelayakan untuk sejumlah proyek strategis, seperti pengembangan energi panas

bumi di Filipina,

Contoh konkret lain dari bantuan ekonomi PGII adalah dukungan hibah untuk pengembangan proyek Koridor Ekonomi Luzon sebagai bagian dari inisiatif PGII serta koridor ekonomi terbaru dan yang pertama di Indo-Pasifik, menghubungkan Kawasan strategis antara Teluk Subic, Clark, Manila, dan Batangas, yang merupakan pusat logistic, industri, dan ekonomi utama di Pulau Luzon, Filipina (“Fact Sheet: Partnership for Global Infrastructure and Investment at the G7 Summit | The White House”, 2024).

Sebagai bentuk komitmen Pembangunan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan USAID berkomitmen untuk menyediakan lebih dari \$14,75 juta dalam bentuk hibah untuk mendukung persiapan proyek dan bantuan teknis di sepanjang koridor tersebut, dengan rincian tergantung pada persetujuan Kongres AS. Bantuan tersebut mencerminkan pendekatan PGII yang mengedepankan Pembangunan berbasis nilai, transparansi, serta keberlanjutan (“Fact Sheet: Partnership for Global Infrastructure and Investment at the G7 Summit | The White House”, 2024).

Secara sectoral, intervensi PGII di Koridor Luzon terbagi menjadi 5 bidang utama. Di sektor pertanian, USAID mendukung konsultasi transaksi untuk pengembangan terminal makanan dan pusat transportasi di Clark International Airport, yang bertujuan memperkuat rantai pasokan agribisnis regional. Pada sektor transportasi, USTDA memberikan pendanaan untuk studi kelayakan ekspansi sistem manajemen lalu lintas kapal, mencakup hingga 10 lokasi di Filipina. Di sektor energi bersih, USTDA mendanai studi kelayakan dan proyek percontohan yang melibatkan *Energy Development Corporation*, pengembang energi swasta local dalam mengevaluasi teknologi *GreenFire Energy* untuk meningkatkan

kapasitas pembangkit listrik panas bumi. Sementara pada sektor digital, USTDA juga mendanai studi dan pilot project untuk *Now Telecom Company, Inc.*, dalam rangka pengembangan jaringan 5G berbasis seluler dan nirkabel tetap, sebagai langkah mempercepat transformasi digital di Filipina (“Fact Sheet: Partnership for Global Infrastructure and Investment at the G7 Summit | The White House”, 2024).

Keseluruhan proyek ini menunjukkan bahwa PGII bukan hanya menjanjikan investasi infrastruktur, namun juga mengintegrasikan komponen strategis seperti teknologi, energi bersih, dan ketahanan pangan. Pengembangan Koridor Luzon menjadi representasi nyata dari penggunaan *economic assistance* strategis oleh AS dan mitra G7 sebagai tantangan terhadap pendekatan geoekonomi BRI Tiongkok, khususnya di Kawasan *Global South*. Demikian, PGII merupakan refleksi dari pemanfaatan *economic assistance* sebagai alat geoekonomi, yang dalam kerangka pemikiran Blackwill dan Harris digunakan untuk menciptakan pengaruh strategis, memperluas jaringan aliansi, serta mengarahkan orientasi politik negara penerima bantuan.

3.3 National Policies Governing Energy and Commodities

National policies governing energy and commodities adalah salah satu dari tujuh instrument geoekonomi utama yang diidentifikasi oleh Blackwill dan Harris, instrument tersebut merujuk pada penggunaan sumber daya energi seperti minyak, gas, dan tenaga nuklir serta komoditas strategis seperti mineral langka, logam tanah jarang, pangan, dan air oleh negara sebagai alat untuk mencapai tujuan politik luar negeri serta kepentingan strategis nasional. Dengan kata lain, kebijakan nasional yang digunakan oleh negara untuk mengendalikan sumber daya energi serta komoditas strategis guna mencapai tujuan geopolitik serta ekonomi (Blackwill and

Harris 2016, 85-87).

Terdapat beberapa konsep utama pada instrumen ini, yang pertama adalah pengendalian pasokan energi yang dimana negara dapat menggunakan kebijakan nasional untuk mengatur produksi, ekspor, dan impor energi guna memperkuat posisi ekonomi dan diplomatiknya. Kemudian yang kedua adalah manipulasi harga distribusi komoditas oleh pemerintah. Ketiga adalah sanksi ekonomi terhadap energi, dijelaskan bahwa negara dapat menerapkan sanksi pada pesaing untuk membatasi akses mereka terhadap sumber daya energi. Dan yang terakhir adalah diplomasi energi oleh negara untuk menjalin aliansi strategis dengan produsen energi utama guna memastikan stabilitas pasokan dan memperkuat pengaruh geopolitiknya.

Dengan melalui BRI, Tiongkok berupaya mencapai beberapa kepentingan nasional strategis dengan diplomasi energi, salah satunya adalah BRI dirancang untuk mengamankan akses sumber energinya lewat kerja sama dengan negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan melalui proyek CPEC, alih-alih untuk bekerja sama Tiongkok mendahulukan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya mengingat keamanan energi merupakan hal penting dari keamanan nasional. Melalui proyek CPEC, Tiongkok berupaya mengamankan impor energi dari Timur Tengah serta menjadikan Pakistan sebagai akses gerbang untuk memperluas perekonomiannya, tidak hanya menuju kawasan Timur Tengah namun juga Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Hal tersebut dikarenakan Timur Tengah menjadi sumber energi utama bagi Tiongkok. Demikian pula Timur Tengah merupakan negara penghasil minyak mentah terbesar di dunia. Dengan adanya pembangunan infrastruktur pada proyek CPEC yang didanai oleh BRI Tiongkok, membuat jalur pendistribusian sumber energi yang dilewati Tiongkok lebih cepat

dan aman (diversifikasi alur energi) (Rauf and Zeidan 2025). Sebagai salah satu nyawa perekonomian Tiongkok, sektor industri memiliki peranan penting bagi pendapatan negara, oleh sebab itu ketersediaan teknologi serta energi yang dibutuhkan menjadi syarat mutlak untuk industri supaya mampu berkompetisi baik secara nasional maupun internasional. Selain untuk mendongkrak perekonomian nasional Tiongkok, bisa juga untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Tiongkok itu sendiri (Vieriawan 2021, 7-8).

Selain melalui proyek CPEC, Tiongkok juga memanfaatkan sumber daya alam utamanya dalam bentuk energi hijau sebagai instrumen geoekonomi yang sejalan dengan *National Policies Governing Energy and Commodities* menurut Blackwill dan Harris. Investasi pada energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin tidak hanya menjadi strategi untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam transisi energi, tetapi juga memperluas pengaruh ekonomi-politik Tiongkok di negara mitra. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 keterlibatan Tiongkok dalam energi hijau mencapai sekitar 11,8 miliar, dan pada paruh pertama 2025 sudah mencapai \$9,7 miliar, menjadikannya salah satu komponen terbesar dalam proyek BRI. Dengan menanamkan investasi energi hijau di berbagai negara seperti Pakistan, Mesir, hingga Asia Tengah, Tiongkok tidak hanya mendukung agenda keberlanjutan global, tetapi juga menciptakan ketergantungan teknologi dan finansial yang dapat dimanfaatkan sebagai leverage geopolitik. Dengan demikian, kebijakan energi hijau Tiongkok dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi instrumen *National Policies Governing Energy and Commodities*, karena menghubungkan kontrol atas pasokan energi strategis dengan perluasan pengaruh geoekonomi secara global (Wang P. C., 2025).

Sementara itu AS berusaha untuk meningkatkan pengaruh ekonominya

melalui investasi infrastruktur yang strategis, hal tersebut dapat membantu AS untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin ekonomi global. Kebijakan nasional yang mengatur energi dan komoditas strategis merupakan instrumen geoekonomi yang efektif untuk menciptakan *asymmetric interdependence* yaitu situasi di mana suatu negara dapat memanfaatkan ketergantungan negara lain atas sumber daya atau infrastrukturnya (Blackwill and Harris 2016, 114). Dalam konteks ini, kontrol terhadap rute distribusi dan pasokan komoditas kritis menjadi alat untuk memperkuat pengaruh geopolitik sekaligus mengurangi kerentanan terhadap dominasi pesaing strategis.

Salah satu implementasi nyata dari pendekatan ini adalah pembangunan Koridor Ekonomi Lobito di bawah inisiatif PGII. Pemerintah AS, melalui DFC, mengalokasikan pendanaan sebesar \$250 juta untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan Angola, Republik Demokratik Kongo, dan Zambia. Proyek ini bertujuan memfasilitasi pengangkutan tembaga dan kobalt dua komoditas vital untuk transisi energi global ke pasar internasional. Selain itu, EXIM Bank menyediakan \$900 juta untuk proyek energi surya pendukung di Angola guna memastikan keberlanjutan operasional koridor ini (The White House 2023).

Koridor Ekonomi Lobito yang menjadi salah satu proyek unggulan dalam inisiatif PGII tidak hanya merepresentasikan pembangunan infrastruktur lintas negara di Afrika, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjamin keamanan pasokan sumber daya mineral kritis yang dibutuhkan Amerika Serikat dan mitra G7. Mineral seperti tembaga dan kobalt merupakan komponen vital dalam mendukung transisi energi global, khususnya dalam pengembangan kendaraan listrik dan penyimpanan energi. Oleh karena itu, pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Zambia, Republik Demokratik Kongo, dan Angola menuju

Pelabuhan Lobito bukan semata berfungsi sebagai sarana transportasi, melainkan sebagai instrumen geoekonomi untuk mengamankan akses Amerika Serikat terhadap rantai pasokan energi bersih.

Keamanan koridor ini dicapai melalui beberapa aspek. Pertama, koridor ini berfungsi untuk mengurangi ketergantungan negara-negara Afrika pada jalur logistik yang berada dalam pengaruh Tiongkok, sehingga memberikan alternatif distribusi yang lebih netral dan sejalan dengan kepentingan Barat. Kedua, keterlibatan lembaga keuangan Amerika Serikat seperti DFC dan EXIM Bank memastikan penerapan standar tata kelola internasional yang transparan, sehingga mengurangi potensi risiko politik maupun ekonomi yang dapat mengganggu keberlangsungan pasokan. Ketiga, integrasi proyek energi terbarukan, misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Angola, tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional koridor, tetapi juga memperkuat legitimasi AS sebagai pemimpin dalam transisi energi hijau.

Dengan demikian, Koridor Lobito dapat dipandang sebagai strategi geoekonomi yang bertujuan mengamankan akses jangka panjang Amerika Serikat terhadap mineral strategis, mengurangi kerentanan terhadap dominasi Tiongkok dalam sektor pertambangan Afrika, serta memperkuat posisi AS dalam arsitektur energi global.

Strategi AS dalam PGII menunjukkan bahwa keamanan koridor energi dijaga melalui kombinasi infrastruktur strategis, mekanisme pendanaan transparan, kerja sama multilateral, serta integrasi energi hijau, sehingga jalur distribusi mineral kritis tetap aman sekaligus memperkuat posisi AS dalam persaingan geoekonomi global. Kebijakan seperti ini secara langsung merefleksikan manfaat dari instrumen geoekonomi “*National policies governing energy and commodities*”, dengan

menguasai infrastruktur transportasi di kawasan penghasil mineral kritis, AS menciptakan ketergantungan baru bagi negara-negara Afrika pada logistik yang dikendalikan oleh AS. Serta dukungan proyek energi surya menunjukkan bagaimana AS memadukan kebijakan energi bersih dengan pengamanan pasokan mineral strategis, sebuah pendekatan yang selaras dengan konsep instrumen geoekonomi *National policies governing energy and commodities*.

Di bawah kepemimpinan Joe Biden, AS dan sekutu G7 nya menyadari bahwa negara-negara berkembang mulai bergantung pada Tiongkok, membuat AS meluncurkan alternatif yang disebut PGII yang didirikan pada tahun 2022 dalam pertemuan G7 ke-48. Inisiatif ini bertujuan mengatasi kesenjangan infrastruktur di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, fokus pada iklim, kesehatan, teknologi digital, dan kesetaraan gender dapat menjadi pilihan yang menarik bagi negara-negara miskin dan berkembang karena kerangka kerja tersebut memiliki standar regulasi, sosial, lingkungan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat serta model keuangan PGII mengikuti model keuangan yang transparan dan wajar serta menguntungkan bagi semua pihak. Maka dengan meluncurkan inisiatif PGII dengan menggunakan strategi dari kekurangan BRI Tiongkok memberikan peluang bagi AS menghasilkan geopolitiknya yaitu menjaga kedudukannya di ranah global.

Untuk memperjelas perbedaan pendekatan geoekonomi antara BRI yang dipimpin oleh Tiongkok dan PGII yang diinisiasi oleh AS dan negara-negara G7, berikut disajikan perbandingan tiga indikator utama yang digunakan dalam kerangka pemikiran analisis ini. Tabel berikut menggambarkan karakteristik masing-masing inisiatif berdasarkan strategi pembiayaan, sektor prioritas, dan tujuan geoekonomi, guna menunjukkan bagaimana kedua aktor global bersaing dalam membentuk arsitektur infrastruktur di negara berkembang.

Tabel 3.1 Perbandingan Indikator Geoekonomi Dalam Inisiatif BRI dan PGII

Indikator Geoekonomi	BRI Tiongkok	PGII AS & G7
<i>Investment Policy</i>	Tiongkok menyalurkan investasi besar dalam bentuk <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) dan pinjaman jangka panjang, misalnya proyek <i>Mombasa–Nairobi Standard Gauge Railway</i> di Kenya senilai ± \$3,2–3,6 miliar. Investasi BRI cenderung berbentuk pembangunan infrastruktur fisik (pelabuhan, rel, energi) dengan skema pembiayaan dominan melalui bank milik negara (Exim Bank of China, CDB)	PGII mengedepankan investasi multilateral dengan skema pembiayaan yang lebih transparan, seperti <i>Lobito Corridor</i> (Angola–Zambia–DRC) dengan komitmen awal ± \$2,0 miliar, tambahan dari DFC sebesar \$553 juta, serta dukungan \$600 juta dari Pemerintah AS. Fokus investasi diarahkan pada infrastruktur hijau dan rantai pasokan mineral strategis.
<i>Economic Assistance</i>	BRI menawarkan pembiayaan dengan bunga rendah (<i>soft loan</i>) pinjaman lunak dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk “bantuan”, namun kerap menimbulkan isu utang jangka panjang (contoh: Sri Lanka, Hambantota Port). Bantuan ini lebih menekankan pada kepentingan strategis Tiongkok untuk memperluas akses ekonomi.	PGII menyalurkan <i>grant</i> dan pinjaman lunak melalui lembaga keuangan seperti USAID, DFC, dan USTDA. Bantuan diarahkan pada proyek berstandar tinggi (iklim, digitalisasi, kesehatan, energi bersih), serta diposisikan sebagai alternatif yang “adil dan transparan” dari BRI.
<i>National Policies Governing Energy and Commodities</i>	Fokus pada pengamanan Sumber Daya Alam (SDA) untuk menunjang industri domestik Tiongkok, misalnya CPEC di Pakistan (Pelabuhan Gwadar) untuk mengamankan	Melalui PGII, AS meluncurkan proyek Koridor Lobito untuk menyalurkan tembaga dan kobalt—komoditas vital transisi energi global—ke pasar internasional. Selain itu, proyek energi surya di

	jalur impor minyak dari Timur Tengah, serta proyek energi hijau (hydropower, solar) di Afrika	Angola (US\$ 900 juta oleh EXIM Bank AS) memperlihatkan strategi penggabungan kebijakan energi bersih dengan pengamanan pasokan mineral strategis.
--	---	--

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hubungan ekonomi antara Tiongkok dan AS telah menjadi salah satu yang paling penting dan kompleks di dunia. Sejarah konflik perang dagang yang dimulai tahun 2018 antara dua kekuatan ekonomi terbesar ini telah menghasilkan dampak signifikan bagi ekonomi global dan berpotensi mengubah dinamika hubungan internasional secara keseluruhan. Kini untuk mencapai dominasi global terdapat pergeseran pola dari militer menjadi ke penggunaan alat-alat ekonomi, antara dua negara yang sedang berseteru ini menggunakan alat ekonomi sebagai ajang mereka memperluas pengaruhnya di ranah global.

Didukung dengan fakta bahwa pasca Perang Dunia II, AS menjadi kekuatan dominan dalam sistem ekonomi serta politik global. AS memimpin dalam membentuk berbagai lembaga-lembaga internasional serta memainkan peran utama dalam membangun tatanan ekonomi berbasis perdagangan bebas dan investasi global. Namun, Tiongkok telah membuat langkah besarnya sendiri dalam mencari sekutu dengan cara memanfaatkan pengaruh ekonominya, yaitu dengan meluncurkan inisiatif BRI yang merupakan strategi pembangunan infrastruktur global yang diprakarsai oleh Tiongkok pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan konektivitas dan kerja sama antarnegara melalui pembangunan jaringan infrastruktur keras, yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, dan sekitarnya.

Hubungan ekonomi Tiongkok dengan AS bersifat kompetitif dimana kedua negara berupaya untuk menjadi negara hegemon ekonomi terbesar. Namun, seiring

berjalannya waktu pemerintahan AS dibawah Donald Trump ternyata menjalankan kebijakan luar negeri Isolasionisme, yaitu sebuah prinsip atau praktik politik dan ekonomi dengan menunjukkan minat hanya pada negaranya saja dan tidak terlibat pada kegiatan internasional. Biden menyadari jika situasi tersebut memaksa AS untuk berinovasi dan mengambil inisiatif untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin meluas, Biden tahu bahwa sumber-sumber kekuatan telah mengalami pergeseran, yaitu lebih menekankan pada kekuatan ekonomi.

Upaya yang dilakukan AS sebagai penyeimbang pengaruh BRI Tiongkok adalah diluncurkannya Inisiatif BRI versi barat, yaitu PGII. PGII adalah inisiatif yang didirikan oleh negara-negara G7 di bawah kepemimpinan AS dan dirancang untuk memberikan alternatif dari BRI Tiongkok bagi negara-negara miskin dan berkembang. Strategi yang digambarkan berbeda dengan strategi dari inisiatif luncuran Tiongkok, PGII cenderung merancang strateginya untuk menangkalkan kekurangan dari inisiatif BRI, dengan mempromosikan investasi infrastruktur berkualitas tinggi yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi global, dan transparansi dalam proses investasi termasuk pengelolaan hutang yang bertanggung jawab. Hal tersebut menghindari jebakan hutang yang sering dikaitkan dengan beberapa proyek BRI Tiongkok.

Pendekatan-pendekatan geoekonomi kedua negara tersebut di berbagai wilayah menunjukkan upaya mempertahankan kapasitas mereka dalam berkontribusi ditengah persaingan investasi global. Persaingan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep geoekonomi yang dikembangkan oleh

D. Blackwill dan Jennifer M. Harris, yang berfokus pada penggunaan alat ekonomi seperti investasi, serta bantuan pembangunan untuk mencapai kepentingan nasional serta tujuan geopolitik. Dalam kasus Tiongkok dan AS, BRI

dan PGII digunakan untuk mengamankan kepentingan strategisnya masing-masing, baik dalam hal pengaruh politik ataupun dominasi ekonomi global.

Dalam konteks ketergantungan ekonomi dan ekspansi pengaruh global, BRI Tiongkok telah menunjukkan dominasi yang lebih luas dengan proyek-proyek besar dan keterlibatan negara mitra yang tinggi. Namun, dari aspek transparansi, keberlanjutan, dan standar tata kelola, PGII yang didukung oleh negara-negara G7 menawarkan pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Barat. Dengan demikian, keberhasilan kedua inisiatif tergantung pada perspektif yang digunakan: BRI unggul dalam skala dan kecepatan ekspansi, sementara PGII menekankan tata kelola dan keberlanjutan sebagai faktor utama.

4.2 Rekomendasi

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada dinamika persaingan investasi antara Tiongkok dan AS pada masa kepemimpinan Joe Biden tahun 2022- 2024 dengan menggunakan konsep Geoekonomi dari Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menyadari adanya banyak kekurangan pada penelitian terutama terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya literatur bacaan yang membuat penulis menyadari bahwasanya penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna dan hasil dari perbandingannya belum cukup mendetail. Kemudian, seiring berjalannya waktu dan era pastinya penelitian ini mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan jika penelitian selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan menggunakan konsep atau metode lain dengan pembahasan yang lebih komprehensif serta lebih mendetail, dan pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik dalam meneliti tema yang serupa dan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- AlAlkim, Hassan H. 2021. "U.S. President Joe Biden's Foreign Policy towards the Gulf." *U.S. President Joe Biden's Foreign Policy towards the Gulf*, (Jnu), 382. 10.4236/ojps.2021.113026.
- Arisanto, Puguh T., and Adi Wibawa. 2021. *Perang Dagang Era Donald Trump Sebagai kebijakan Luar Negeri Adaptif Convulsive Amerika Serikat 5* (Juni). 10.32787/ijir.v5i2.222.
- Banik, Katja. 2019. "Europe and China in a Globalized World The Geopolitical Impacts of Belt and Road." 2 (Maret). 10.1142/S2591729319500032.
- Bariah, Inayatul, Nuzulul Anam, A. G. Mubarok, and Sahril F. Rohman. 2020. *Strategi Kebijakan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perang Dagang AS-China* 4, no. 2 (Oktober).
- Bariah, Inayatul, Nuzulul Anam, A. G. Mubarok, and Sahril F. Rohman. 2020. *Strategi Kebijakan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Dampak Peran Dagang AS-China* 4, no. 2 (Oktober). <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1023/pdf>.
- Biro Pers, M. d. (2023, Mei 21). *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*. From <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5147/indonesia-manfaatkan-program-pgii-baru-dalam-mendorong-pembangunan-infrastruktur-koridor-ekonomi-dan-konektivitas>
- Blackwill, Robert D., and Jennifer M. Harris. 2016. *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*. N.p.: Harvard University Press. 10.4159/9780674545960.
- "Critical infrastructure in geostrategic competition: comparing the US and Chinese Silk Road projects." 2019. In *Geo-economics and Power Politics in the 21st Century: The Revival of Economic Statecraft*, edited by Mikael Wigell, Sören Scholvin, and Mika Aaltola, 43. N.p.: Routledge. <https://www.routledge.com/Geo-economics-and-Power-Politics-in-the-21st-Century-The-Revival-of-Economic-Statecraft/Wigell-Scholvin-Aaltola/p/book/9780367480493?srsltid=AfmBOorNloZDJgndrylYEmFwMjnuOUMUk5DUt1NFRaVSoXdSsa3a7RkW>.
- Capling, A. (2008). Australia's trade policy dilemmas. *Australian Journal of International Affairs*, 62(2), 229–244. <https://doi.org/10.1080/10357710802060576>
- Cai, Peter. 2017. "Understanding China's Belt and Road Initiative," Paper Policy. Lowy Institute for International Policy. <https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-china-s-belt-road-initiative>.
- Carrai, Maria A. 2023. "Is America Losing the Global South? Assessing the Dynamics of Sino-American Rivalry in Infrastructure Diplomacy." 67, no. 4 (Agustus). 10.1016/j.orbis.2023.08.004.
- Ehtisham, LTC K. 2022. "Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) A West's Initiative to Uplift Developing Countries and Counter BRI." (September), 1-2. <https://nesa-center.org/partnership-for-global-infrastructure-and-investment-pgii-a-west-s-initiative-to-uplift-developing-countries-and-counter-bri/>.

- Erba, Reyhan. 2024. "Belt and Road Initiative sebagai Gerbang Konektivitas di Asia Tenggara." 12, no. 2 (Juli - Desember): 130. <https://doi.org/10.33005/jgp.v12i02.4649>.
- Executive Office of the President. 2022. "Partnership for Global Infrastructure and Investment." Federal Register. <https://www.federalregister.gov/documents/2022/06/30/2022-14198/partnership-for-global-infrastructure-and-investment>.
- G7 Research Group. 2024. "Factsheet on the G7 Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII)." G7 Information Centre. <https://g7.utoronto.ca/dev/2024-annex-igpii.html>.
- Fathana, H. (2018). Palm Oil Politics in Malaysia and Indonesia: Competition or Collaboration? *jati - journal of southeast asian studies*, 23(2), 47–64. <https://doi.org/10.22452/jati.vol23no2.3>
- "fact sheet: Partnership for Global Infrastructure and Investment at the G7 Summit | The White House." 2024. Biden White House. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2024/06/13/fact-sheet-partnership-for-global-infrastructure-and-investment-at-the-g7-summit-2/>.
- "Geo-economics and Power Politics in the 21st Century:." 2019. In *Geo economics and Power Politics in the 21st Century: The Revival of Economic Statecraft*, edited by Mikael Wigell, Sören Scholvin, and Mika Aaltola. N.p.: Routledge.
- Green, Michael J., Zack Cooper, Matthew Funaiole, Jesse B. Gale, Jonathan Hillman, Gurmeet Kanwal, Harsh V. Pant, Gregory B. Poling, and Andrew Shearer. 2018. "China's Maritime Silk Road foreword Strategic and Economic Implications for the Indo Pacific Region." CSIS. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/chinas-maritime-silk-road-strategic-and-economic-implications-indo-pacific-region>.
- Green, Michael J., Zack Cooper, Matthew Funaiole, Jesse B. Gale, Jonathan Hillman, Gurmeet Kanwal, Harsh V. Pant, Gregory B. Poling, and Andrew Shearer. 2018. "China's Maritime Silk Road foreword Strategic and Economic Implications for the Indo Pacific Region." CSIS. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/chinas-maritime-silk-road-strategic-and-economic-implications-indo-pacific-Assessment>. Edited by John Chipman and International Institute for Strategic Studies. 1st ed. London: International Institute for Strategic Studies (IISS). 10.4324/9781003393429.
- Hurley, John. 2018. "Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective." Center for Global Development. <https://www.cgdev.org/publication/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-a-policy-perspective>.
- International Institute for Strategic Studies, The (The International Institute for Strategic S., ed. 2022. *China's Belt and Road Initiative: A Geopolitical and Geo-economic Assessment*. London, UK: Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781003393429>.
- Interesse, G. (2024, Juni 5). *ASEAN Briefing* . From ASEAN Briefing : <https://www.aseanbriefing.com/news/chinas-investments-in-indonesia-2024-outlook/?utm>

- Iriawan, Sony. 2020. "kebijakan the silk road economic belt dalam mendukung proyeksi geopolitik cina di kawasan." 10 (Agustus): 152. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/index/search>.
- Iriawan, Sony. 2020. "kebijakan the silk road economic belt dalam mendukung proyeksi geopolitik cina di kawasan." 10 (Agustus): 152. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/index/search>.
- Iswardhana, Muhammad R. 2022. "wujud dominasi tiongkok di dunia." *geoekonomi bank investasi infrastruktur asia (AIIB): wujud dominasi tiongkok di dunia* 6 (April): 3.
- Iswardhana, Muhammad R. 2022. "wujud dominasi tiongkok di dunia." *geoekonomi bank investasi infrastruktur asia (AIIB): wujud dominasi tiongkok di dunia* 6 (April): 4.
- Johnston, Lauren A. 2018. "The Belt and Road Initiative: What is in it for China?" (September), 42. 10.1002/app5.265.
- Khan, Abdul M. 2024. "The Geopolitics of Global Infrastructure Projects: Challenges and Opportunities for Health and Wellbeing." (September). 10.1093/ooih/ouae006.
- Knowledge Management Center, IRIS Institute. 2024. "BRI dan PGII : Perbandingan Inisiatif Infrastruktur Global oleh China dan Amerika Syarikat." (Juni). <https://fokus.my/bri-dan-pgii-perbandingan-inisiatif-infrastruktur-global-oleh-china-dan-amerika-syarikat/?form=MG0AV3>.
- Lai, Karen P., Shaun Lin, and James D. Sidaway. 2020. *Financing the Belt and Road Initiative (BRI): research agendas beyond the "debt trap" discourse*. N.p.: Routledge. 10.1080/15387216.2020.1726787
- Lasos, Elizabeth C., and T. R. Fetter. 2022. "Building Bridges? PGII versus BRI." (September). <https://www.brookings.edu/articles/building-bridges-pgii-versus-bri/>.
- Liu, Hongsong, Yue Xu, and Xinzhu Fan. 2020. "Development finance with Chinese characteristics: financing the Belt and Road Initiative." 63, no. 2 (September). <https://doi.org/10.1590/0034-7329202000208>.
- Loungani, Prakash, and Assaf Razin. 2001. "How Beneficial Is Foreign Direct Investment for Developing Countries?" 38 (Juni). <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/loungani.htm#author>.
- Luttwak, Edward N. 1990. "From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce." (Februari), 17-23. https://www.jstor.org/stable/pdf/42894676.pdf?refreqid=fastly-default%3A84b56e58eeb0b4d432fbceac27c96596&ab_segments=&initiator=&acceptTC=1.
- Marbler, Penelope, and Lea Shan. 2017. *Chinese Investments in Infrastructure Worldwide*, (Juni), 2. <https://www.irisfrance.org/wp-content/uploads/2017/06/Asia-Focus-36.pdf>.
- Mariani, Bernardo. 2023. "The Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) and the Belt and Road Initiative (BRI): Meeting the World's Infrastructure Gaps amid Geopolitical Competition." (Maret), 3. <http://dx.doi.org/10.7488/era/5171>.
- Mariani, Bernardo. 2023. "The Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) and the Belt and Road Initiative (BRI): Meeting the World's Infrastructure Gaps amid Geopolitical Competition," policy report.

- PeaceRep: The Peace and Conflict Resolution Evidence Platform. <https://peacerep.org/wp-content/uploads/2023/03/BRI-PGII-Brief.pdf>.
- Ming, Zhu. 2022. "The Partnership for Global Infrastructure and Investment: An Alternative for China's Belt and Road Initiative?" 8 (Juni). 10.1142/S2377740022500087.
- Moses, Oyintarelado (., and Keren Zhu. 2022. "The Belt and Road Initiative and the Partnership for Global Infrastructure and Investment: Global Infrastructure Initiatives in Comparison." (November). https://www.bu.edu/gdp/files/2022/11/GCI_WP_026_BPG_FIN.pdf?form=MG0AV3.
- Mutlu, Necmettin. 2023. "a causal comparative research: build back better (b3w) and global gateway (gg) projects from a geoeconomic perspective." 4 (Maret): 55. <https://dergipark.org.tr/en/pub/upa/issue/76161/1264555>.
- Nedopil, Christoph. 2024. "China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2023 – Green Finance & Development Center." Green Finance & Development Center. <https://greenfdc.org/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-2023/>.
- Oktaveri, Jhon A. 2021. "G7 versus China: Bagaimana Peta Geopolitik dan Ekonomi Dunia Usai KTT? Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul G7 versus China: Bagaimana Peta Geopolitik dan Ekonomi Dunia Usai KTT?" (Juni). <https://kabar24.bisnis.com/read/20210615/19/1405754/g7-versus-china-bagaimana-peta-geopolitik-dan-ekonomi-dunia-usai-ktt>.
- Prinsloo, Cyril. 2019. "AIIB Membership for African Countries: Drawcards and Drawbacks." 10 (September): 625-630. 10.1111/1758-5899.12734.
- Pujayanti, Adirini. 2018. "Perang Dagang Amerika Serikat – China dan Implikasinya Bagi Indonesia." *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 10 (April)
- Pusat Studi Sosial Asia Tenggara. 2017. "Mega Proyek Tiongkok : Jalur Sutra Abad 21 dan Konektivitas ASEAN." PSSAT UGM. <https://pssat.ugm.ac.id/id/mega-proyek-tiongkok-jalur-sutra-abad-21-dan-konektivitas-asean/>.
- Putri, Helsa E., and Aspin N. Arifin Rivai. 2019. *Donald Trump, America First, dan Deglobalisasi: Bagaimana Kelanjutannya?* 6 (April). <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1318>
- Ravenhill, J. (2008). Fighting irrelevance: An economic community 'with ASEAN characteristics.' *The Pacific Review*, 21(4), 469–488. <https://doi.org/10.1080/09512740802294697>
- Rauf, Shayan, and Adam Zeidan. 2025. "China-Pakistan Economic Corridor: international trade project." (Januari). <https://www.britannica.com/topic/Belt-and-Road-Initiative>.
- Rolland, Nadège. 2017. "Drivers of the Belt and Road Initiative." In *China's eurasian century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative*, 111-113. N.p.: The National Bureau of Asian Research. <https://www.nbr.org/publication/chinas-eurasian-century-political-and-strategic-implications-of-the-belt-and-road-initiative/>.
- Savoy, Conor M., and Shannon McKeown. 2022. "Future Considerations for the Partnership on Global Infrastructure and Investment." (Juni). <https://www.csis.org/analysis/future-considerations-partnership-global-infrastructure-and-investment>.
- Sehrawat, Dr. Anjali. 2024. "China's Belt and Road Initiative: Analysing

- Diplomatic Impacts and Challenges.” 7 (Januari-Februari- Maret). 10.5281/zenodo.10901090.
- Sparke, Matthew. 2007. “Geopolitical Fears, Geoeconomic Hopes, and the Responsibilities of Geography.” 97, no. 2 (Juni): 338-349. 10.1111/j.1467-8306.2007.00540.x.
- Taufik, and Sundari A. Pratiwi. 2021. *american first: kebijakan donald trump dalam pembatasan kaum imigran ke amerika serikat* 6 (November): 225.
- The White House. 2023. “Fact sheet: Partnership for Global Infrastructure and Investment at the G7 Summit.” The White House. https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefinroom/statements-releases/2023/05/20/fact-sheet-partnership-for-global-infrastructure-and-investment-at-the-g7-summit/?utm_source=chatgpt.com.
- Tsuji, Cinatsu. 2024. “Belt and Road Initiative Chinese-led infrastructure project.” (Desember). <https://www.britannica.com/topic/geopolitics>.
- U.S. Department of the Treasury. 2022. “READOUT: Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Convenes Multilateral Development Banks to Urge Scaled Up Infrastructure Investment and Private Sector Capital Mobilization.” U.S. Department of the Treasury. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1033>.
- U.S. Embassy & Consulates in the United Kingdom. 2021. “President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) Partnership.” President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) Partnership. <https://uk.usembassy.gov/president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/?form=MG0AV3>.
- Vieriawan, Naomi. 2021. *Kerja Sama Pakistan-Tiongkok dalam Pemenuhan Kepentingan Nasional Tiongkok di Bidang Energi*. Bandung: Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/15024>.
- Wang, Christoph N. 2024. “China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2023 – Green Finance & Development Center.” Green Finance & Development Center. <https://greenfdc.org/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-2023/>.
- Wood, Frances. 2002. *The Silk Road: Two Thousand Years in the Heart of Asia*. N.p.: University of California Press. https://www.google.co.id/books/edition/The_Silk_Road/zvoCv3h2QCcC?hl=id&gbpv=0&kptab=overview.
- Yang, Xiangfeng. 2021. “US-China Crossroads Ahead: Perils and Opportunities for Biden.” *US-China Crossroads Ahead: Perils and Opportunities for Biden*, (Maret).10.1080/0163660X.2021.1894723.
- Yu, Hong. 2024. “What is the PGII All About?” In *Understanding China's Belt and Road Initiative*, 146. Vol. 26. N.p.: Springer Nature Singapore, Imprint: Springer. 10.1007/978-981-99-9633-9. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-99-9633-9>. Yu, Hong. 2024. *Understanding China's Belt and Road Initiative*. Vol. 26. N.p.: Springer Nature Singapore, Imprint: Springer.
- Zaki, Amril H., and Ahmad Sahide. 2023. “Joe Biden’s foreign policy in dealing with China.” *Joe Biden’s foreign policy in dealing with China*, (November). <https://10.31893/multirev.2024024>.

Zhu, Ming. 2022. "The Partnership for Global Infrastructure and Investment: An Alternative for China's Belt and Road Initiative?" 08. 10.1142/S2377740022500